

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

ANINDITO BAGUS YULIANTO (18312288)

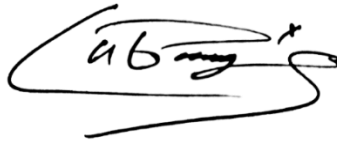
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:



Nama: Anindito Bagus Yulianto

No. Mahasiswa: 18312288

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 4 April 2022

Dosen Pembimbing



(Johan Arifin, SE, M.Si., Ph.D., CFA.)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anindito Bagus Yulianto

NIM : 18312288

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

Judul : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 April 2022



Anindito Bagus Yulianto

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman

Disusun oleh : ANINDITO BAGUS YULIANTO

Nomor Mahasiswa : 18312288

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 08 Juni 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D


.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, Dr., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan sebanyak 106 responden yang berasal dari 24 OPD di Pemerintah Kabupaten Pasaman. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas, sekretaris, kepala sub bagian keuangan, staf sub bagian keuangan, dan bendahara. Data yang diperoleh berupa data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Data kuesioner ini diolah menggunakan aplikasi SPSS. Uji coba instrument menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis koefisien determinasi dan uji T. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Standar akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of regional financial accounting standards, the application of the regional government accounting system, the competence of human resources, and the use of information technology on the quality of the financial statements of the regional government of Pasaman. In this study, the population used was 106 respondents from 24 OPD in the Pasaman Regency Government. Respondents in this study were the head of the department, secretary, head of the finance sub-section, staff of the finance sub-division, and treasurer. The data was obtained in the form of primary data obtained through the distribution of questionnaires. The questionnaire data were processed using the SPSS application. The instrument trial used validity and reliability tests. Classical assumption test is done using normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. To test the hypothesis used analysis of the coefficient of determination and T-test. The results of this study indicate that local government accounting standards, regional government accounting systems, and human resource competencies have a positive effect on the quality of local government financial reports. While the use of Information Technology does not affect the Quality of Local Government Financial Reports.

Key Words: Quality of Local Government Financial Reports, Local Government Accounting Standards, Competence of Human Resources, Utilization of Information Technologi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.”

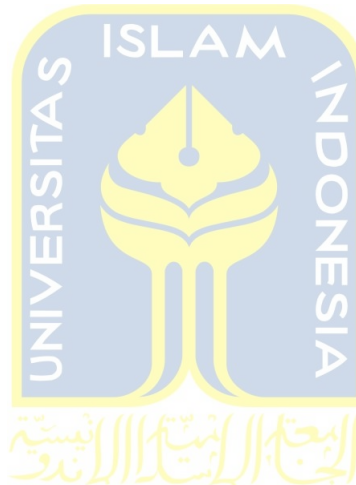
Dalam penulisan skripsi ini, banyak dukungan, bantuan, serta bimbingan baik moral dan materil yang penulis terima sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Teguh Suprianto dan Yuliasma yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan bimbingannya selama ini. Serta Kedua saudara dan saudari penulis, Nugraha Hadi Yulianto dan Nisrina Khalila Yulianto yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor UII.
3. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
4. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan berbagai kritik dan saran serta bimbingan sehingga dapat menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen jurusan akuntansi UII yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh responden dari bagian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang telah sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman akuntansi UII angkatan 2018 yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan telah memberikan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

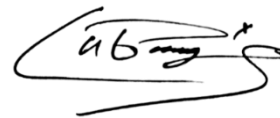
Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan dan masih kurangnya pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dengan segala kerendahan hati untuk kritik dan saran yang dapat membangun demi menyempurnakan tugas akhir ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis sendiri maupun semua pihak dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.



Yogyakarta, 4 April 2022

Penulis,



Anindito Bagus Yulianto

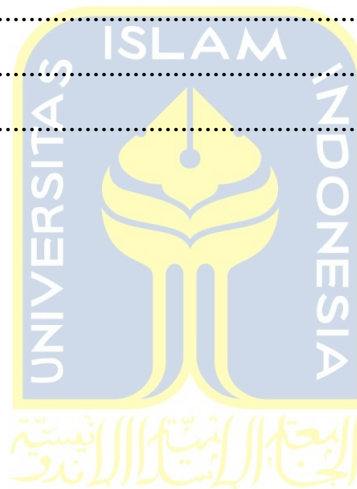
NIM. 18312288

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Stewardship	8
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	9
2.1.3 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	10
2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	11
2.1.5 Teknologi Informasi.....	11
2.1.6 Laporan Keuangan yang Berkualitas	12
2.2 Penelitian Terdahulu	14
2.3 Pengemabangan Hipotesis	17
2.3.1 Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.3.2 Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18

2.3.3 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
2.3.4. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Populasi dan Sampel	22
3.2 Jenis dan Sumber Data	22
3.3 Teknik Pengumpulan Data	23
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	23
3.4.1 Variabel Dependen	23
3.4.2 Variabel Independen	24
3.5 Instrumen Penelitian.....	25
3.6 Alat Analisis.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	26
3.7.2 Uji Kualitas Data	26
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	27
3.7.4 Pengujian Hipotesis.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum	30
4.1.1 Profil Singkat Kabupaten Pasaman	30
4.1.2 Deskriptif Data Umum	30
4.1.3 Karakteristik Responden	32
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	36
4.3 Uji Kualitas Data.....	38
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.4.1 Uji Normalitas	42
4.4.2 Uji Multikolinearitas	43
4.4.3 Uji Heterokedastisitas	44

4.5 Pengujian Hipotesis.....	45
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	45
4.5.2 Uji T.....	46
4.6 Pembahasan.....	47
4.6.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.....	47
4.6.2 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	48
4.6.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	50
4.6.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55



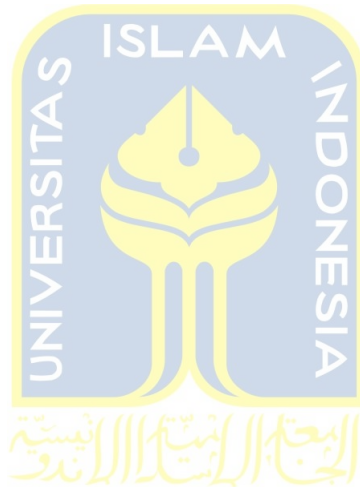
DAFTAR TABEL

TABEL 1.....	14
TABEL 2.....	31
TABEL 3.....	31
TABEL 4.....	33
TABEL 5.....	33
TABEL 6.....	35
TABEL 7.....	35
TABEL 8.....	37
TABEL 9.....	39
TABEL 10.....	39
TABEL 11.....	40
TABEL 12.....	40
TABEL 13.....	41
TABEL 14.....	42
TABEL 15.....	42
TABEL 16.....	43
TABEL 17.....	44
TABEL 18.....	46
TABEL 19.....	46



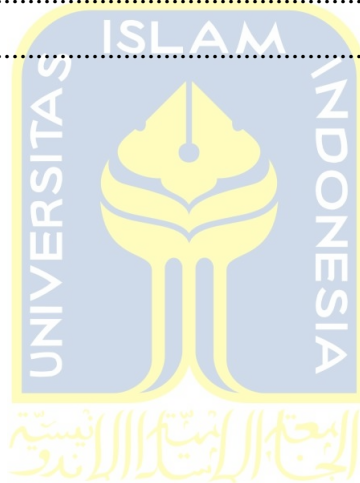
DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	21
GAMBAR 2	33
GAMBAR 3	34
GAMBAR 4	35
GAMBAR 5	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	58
Lampiran 2	68
Lampiran 3	69
Lampiran 4	74
Lampiran 5	88
Lampiran 6	95
Lampiran 7	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja pemerintah yang baik dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan disampaikan tepat waktu menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah di mana menjadi cermin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, amanah, dan demokratis. Laporan keuangan dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya. Tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi tentang hasil operasi, arus kas, saldo anggaran lebih, realisasi anggaran, posisi keuangan dan perubahan modal suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Tawaqal & Suparno, 2017).

Dewasa ini, tuntutan akuntabilitas terhadap pelaporan keuangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan meningkatnya pemahaman masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai penggunaan dana publik oleh pemerintah untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan sebagai penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam suatu periode. Akuntabilitas membutuhkan keikutsertaan masyarakat untuk dapat melahirkan kebijakan publik yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah di setiap periodenya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan pemerintah. Di dalam laporan keuangan ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah menyalurkan dan memanfaatkan dana anggaran yang diterima di setiap periodenya apakah pemanfaatannya sudah sesuai dengan kebutuhan publik. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat

memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah yang disini berperan sebagai pemegang kepercayaan dapat memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berperan sebagai pihak yang memberi kepercayaan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi penilaian kinerja pemerintah bagi masyarakat.

Menurut BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), masih adanya daerah yang belum memperoleh opini WTP menunjukkan pelaporan keuangan di pemerintah daerah belum dapat diyakini kewajarannya oleh BPK dikarenakan beberapa faktor seperti penyajian laporan keuangan yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah, lemahnya sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurangnya kompetensi SDM pengelola keuangan pemerintah daerah. Hal ini memotivasi peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah faktor-faktor ini memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Putriasri & Abdullah (2017) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. Artinya, semakin baik penerapan standar akuntansi daerah yang diterapkan, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin baik. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Putri (2016), Latifah (2017), Putriasri & Abdullah (2017), Ikyarti & Aprilia (2019) yang menyimpulkan bahwa pengaruh Standar Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholohah (2019) yang menyatakan bahwa Kualitas laporan keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang kurang siap untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual yang berakibat pemerintah daerah masih menggunakan standar akuntansi yang lama di mana pendapatan dan aset masih berbasis kas.

Penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar menjadi faktor fundamental yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Fauziah, 2019). Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2019) menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Putriasri & Abdullah (2017), Utama (2017), dan Megawati (2015) yang menyatakan bahwa pengaruh sistem keuangan pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara positif. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri (2016), Latifah (2017), dan Sholohah (2019) yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan yang digunakan tidak mudah untuk dijalankan sehingga adanya kesulitan dalam proses input data-data yang dibutuhkan.

Sumber daya manusia yang terampil dan kompeten sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Keterbatasan pegawai negeri sipil dengan pelatihan dan ilmu di bidang akuntansi menjadikan kurangnya kompetensi aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola keuangan daerah yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku (Latifah, 2017). Untuk mengatasi ketidakpahaman aparatur negara yang kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk para pegawainya. Putri (2016) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara positif. Dalam pengelolaan bagian keuangan, sumber daya manusia harus diisi dengan

individu yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu keuangan terkait lainnya. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang disusun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriasri & Abdullah (2017), Utama (2017), Tawaqal & Suparno (2017), dan Megawati (2015) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif. Namun, Fauziyah (2019) dan Sholohah (2019) memiliki pandangan yang berbeda dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia (aparatur pemerintah) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini kemungkinan dikarenakan kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang, baik untuk kualitas maupun kuantitas.

Di era digital seperti sekarang ini, penggunaan teknologi dapat menjadi suatu keharusan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Teknologi dapat digunakan untuk membantu sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mengurangi atau menghindari dari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi dalam penyusunannya. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat menghemat waktu dan biaya dalam pembuatan laporan keuangan serta menjaga data-data penting dalam laporan keuangan terjaga dengan aman. Dengan pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Dalam penelitian sebelumnya, masih ada hasil penelitian yang tidak konsisten. Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali tentang kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Selain itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh Kabupaten Pasaman.

Sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 laporan pemeriksaan keuangan BPK-RI di Kabupaten Pasaman memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Pasaman dari yang sebelumnya pada tahun 2014 mendapatkan opini WTP

DP. Namun pada tahun 2017, masih ditemukan temuan yaitu surat perjalanan fiktif pada Pemda Kabupaten Pasaman. Temuan ini antara lain, temuan reguler Inspektorat Pasaman dari semua instansi sebanyak Rp806,36 juta. Kemudian, Inspektorat Provinsi sebesar Rp4,99 juta, serta temuan BPK RI Rp522,41 juta. Dari permasalahan ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian apakah faktor-faktor seperti penerapan standar akuntansi keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi informasi memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya, arah penelitian dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2016) dengan menambahkan satu variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pasaman sudah menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan laporan keuangannya yang diindikasikan dengan penggunaan komputer dan software akuntansi di setiap OPD dalam proses pembuatan laporan keuangan serta tersedianya internet di setiap OPD yang ada di Kabupaten Pasaman sehingga seluruh proses pembuatan laporan keuangan sudah dilakukan secara digital. Dengan ini peneliti dapat mengetahui dan menganalisis apakah dengan penggunaan teknologi yang sudah dilakukan ini dapat memberikan pengaruh atau tidak terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Atas dasar itu penelitian ini berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
4. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

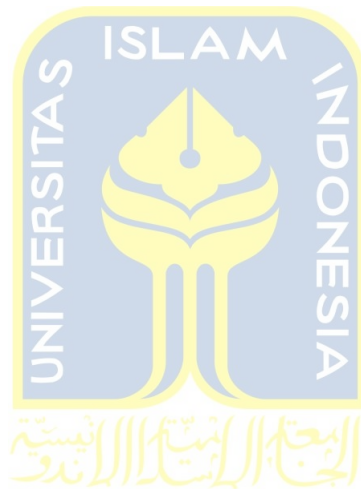
1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang sejauh mana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai sumber informasi terkait pengelolaan keuangan daerah di bidang akuntansi, memberikan wawasan mengenai pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, dan teknologi informasi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mewujudkan akuntabilitas di lembaga pemerintahan.
3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan referensi bagi pihak lain yang membutuhkan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Teori stewardship oleh Donaldson & Davis (1991) menggambarkan situasi di mana motif manajemen didasarkan pada kepentingan organisasi daripada tujuan individu. Hubungan antara kepuasan dan keberhasilan organisasi yang kuat menjadi dasar dalam teori ini. Dengan memaksimalkan utilitas kelompok di mana juga akan meningkatkan kepentingan individu dalam kelompok tersebut akan menghasilkan kesuksesan dalam mencapai tujuan organisasi.

Teori stewardship berasumsi bahwa setiap orang pada umumnya dapat bertanggung jawab, dapat dipercaya, lurus, dan jujur dalam menjalankan kegiatannya. Teori ini melihat manajemen sebagai pihak yang dapat melakukannya untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Konsep dasar dari teori ini adalah kepercayaan kepada pihak yang diberi wewenang, di mana manajemen menjalankan dengan tanggung jawab yang besar amanah yang diberikan.

Menurut Fauziah (2019) teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik dikarenakan sejak awal akuntansi untuk sektor publik telah memenuhi syarat hubungan antara stewards dan principals. Seiring semakin kompleksnya akuntansi sebagai motor penggerak transaksi, keahlian akuntansi bagi lembaga publik pun semakin meningkat. Tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik menjadikan kondisi menjadi lebih kompleks dikarenakan semakin sulitnya principal dalam menjalankan fungsi pengelolaannya.

Objek penelitian ini adalah organisasi sektor publik, yaitu instansi pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini akan menguji efek

pembelajaran teori stewardship pada Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Implikasi dari teori stewardship dengan penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman sebagai steward diharapkan dapat menerapkan standar akuntansi keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia yang kompeten, dan teknologi informasi untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan bertanggung jawab sesuai dengan kepentingan publik dan akuntabilitas keuangan yang telah diamanahkan dalam rangka mencapai ekonomi pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah yang berperan sebagai steward dapat menjalankan tugasnya dengan memberikan hasil yang jujur dan dapat dipercaya. Serta menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah ini diterapkan di lingkungan pemerintahan, yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah di mana satuan organisasi tersebut wajib untuk melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan baik untuk transfer, pembiayaan, dan belanja, evaluasi

efisiensi dan efektivitas laporan, penilaian terhadap kondisi keuangannya, serta taat terhadap peraturan undang-undang dalam penyusunannya.

Standar akuntansi pemerintah ini menjadi pedoman dalam pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan berkualitas. Selain itu penerapan standar akuntansi pemerintah diperlukan dalam menjaga konsistensi pelaporan keuangan pemerintah. Tanpa adanya penerapan standar akuntansi dapat menyebabkan rendahnya objektivitas dan reliabilitas laporan keuangan yang disajikan dan menyulitkan dalam pemeriksaan keuangan dikarenakan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan pemerintah.

2.1.3 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dan prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Latifah (2017) Sistem Akuntansi Keuangan adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan kegiatan akuntansi di mana organisasi mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan data keuangan dari suatu organisasi sehingga dapat menghasilkan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Sistem akuntansi keuangan daerah ini diterapkan agar adanya penataan terstruktur terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Menurut Halim (2007) Sistem akuntansi keuangan daerah mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) di suatu daerah (kabupaten, kota, provinsi) dan menggunakannya sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Dari definisi-definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan

bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu proses akuntansi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBD yang sudah ditetapkan baik secara manual maupun dengan bantuan teknologi informasi.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Di setiap organisasi pastinya sangat membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Kemampuan sumber daya manusia dapat menjadi penentu peningkatan produktivitas kerja dan keberhasilan tujuan organisasi. Orang-orang memainkan peran dalam organisasi terlepas dari tempat dan bentuknya. Di dalam organisasi setiap orang memiliki sifat, kemampuan, kepercayaan pribadi, kebutuhan, pengalaman, dan yang akan membentuk perilaku sumber daya manusia dalam organisasi. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat kompetensi, pengetahuan, kesiapan, dan kemauan sumber daya manusia.

Menurut Adhitama (2017) sumber daya manusia merupakan unsur yang penting sebagai penggerak aktivitas organisasi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan unsur organisasi yang sangat penting, sehingga perlu dikelola dengan maksimal agar dapat berkontribusi secara optimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kapabilitas SDM mencakup kapasitasnya, yaitu kompetensi, suatu organisasi, sistem, atau individu untuk menjalankan fungsi atau kekuasaannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Nurillah & Muid, 2014b).

Menurut Kharis (2010) kompetensi SDM adalah kemampuan SDM untuk menjalankan amanah dan pekerjaan yang diberikan melalui pengalaman dan *training* yang dibutuhkan. SDM yang kompeten ini memiliki pemahaman yang baik tentang logika akuntansi.

2.1.5 Teknologi Informasi

Teknologi informasi digunakan dalam mengolah dan memproses data, memperoleh, menyimpan, serta memanipulasi data agar dapat

menghasilkan informasi berkualitas yang akurat, relevan, dan tepat waktu sehingga dapat digunakan baik untuk bisnis maupun pemerintahan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Teknologi Informasi dapat berupa komputer, perangkat lunak, jaringan, dan database serta jenis lainnya yang ada kaitannya dengan teknologi. Seperangkat komputer digunakan untuk memproses data di mana sistem jaringan akan menghubungkan antar komputer sesuai kebutuhan serta teknologi komunikasi untuk menyediakan distribusi global dan akses ke data (Utama, 2017). Selain berfungsi sebagai sarana pengolahan dan penyimpanan informasi dengan menggunakan teknologi komputer (hardware dan software), juga dapat berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Dalam teknologi informasi, penggunaan komputer tidak hanya meningkatkan kemampuan manusia tetapi komputer juga dapat menyelesaikan tugas yang mungkin tidak mampu untuk dilakukan manusia dengan lebih cepat dan akurat.

2.1.6 Laporan Keuangan yang Berkualitas

Menurut Lillrank (2003) laporan keuangan adalah informasi akuntansi suatu organisasi untuk periode pelaporan akuntansi yang dijadikan sebagai gambaran hasil operasi dan kinerja organisasi. Data dan informasi adalah hasil yang didapatkan dari laporan keuangan. Data ini dapat diolah menjadi informasi sehingga dapat memberikan konteks yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006, menyatakan bahwa pelaporan keuangan adalah tanggung jawab instansi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dalam satu periode akuntansi. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan antara lain laporan posisi keuangan, arus kas, dan realisasi anggaran, serta kinerja keuangan

organisasi yang melaporkan yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi bagi pihak yang membutuhkan (Nurillah & Muid, 2014c).

Laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, bebas dari kesalahan material dan dapat diandalkan, serta dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya dapat dikatakan laporan yang berkualitas (Ikyarti & Aprila, 2019). Karakteristik laporan keuangan yang berkualitas antara lain:

a. Relevan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat membantu dalam mengambil keputusan bagi pengguna dengan membandingkan dan mengevaluasi peristiwa sebelumnya untuk memprediksi kejadian yang akan datang dan belajar dari estimasi di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki karakteristik: manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.

b. Andal

Tidak ada kesalahan saji material dan penyajian yang sesuai dengan fakta dan jujur dalam laporan keuangan serta informasi yang dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik: penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.

c. Dapat dibandingkan

Dapat membandingkan informasi keuangan yang dihasilkan pada periode sebelumnya.

d. Dapat dipahami

Pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan menyesuaikan dengan istilah yang dipahami.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain Fauziyah (2019), Latifah (2017), Putri, Kirmizi, dan Basri (2016), Putriasri dan Abdullah (2017), Utama (2017), Ikyarti dan Aprila (2019), Tawaqal dan Suparno (2017), Megawati dan Sulindawati (2015), dan Sholohah, Sulistyawati, dan Santoso (2019).

Ringkasan penelitian mengenai penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 1

Penelitian terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Fauziyah (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan daerah. • Kompetensi aparatur pemerintah. • Sistem akuntansi keuangan daerah. • Teknologi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • SAPD => KLKPD (Didukung) • KSDM => KLKPD (Tidak didukung) • PTI => KLKPD (Tidak didukung)
2	Latifah (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas informasi laporan keuangan daerah. • Sistem akuntansi keuangan daerah. • Standar akuntansi pemerintah. • Kompetensi sumber daya manusia. • Pengendalian internal. 	<ul style="list-style-type: none"> • SAPD => KLKPD (Didukung) • Sistem APD => KLKPD (Tidak didukung) • KSDM => KLKPD (Tidak didukung) • PI => KLKPD (Tidak Didukung)
3	Putri, Kirmizi,	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan 	<ul style="list-style-type: none"> • PI => KLKPD

	dan Basri (2016)	<p>keuangan pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar akuntansi pemerintah. • Sistem akuntansi keuangan daerah. • Kompetensi sumber daya manusia. • Pengendalian Internal 	<p>(Didukung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • KSDM => KLKPD (Didukung) • SAPD => KLKPD (Didukung) • Sistem APD => KLKPD (Tidak didukung)
4	Putriasri dan Abdullah (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. • Standar akuntansi pemerintahan. • Kompetensi sumber daya manusia. • Sistem akuntansi keuangan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • SAPD => KLKPD (Didukung) • KSDM => KLKPD (Didukung) • Sistem APD => KLKPD (Didukung)
5	Utama (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. • Sistem akuntansi keuangan daerah. • Sistem pengendalian intern. • Pemanfaatan teknologi. • Kompetensi sumber daya manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem APD => KLKPD (Didukung) • PI => KLKPD (Didukung) • TI => KLKPD (Didukung) • KSDM => KLKPD (Didukung)
6	Ikyarti dan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan 	<ul style="list-style-type: none"> • SIM => KLKPD

	Aprila (2019)	<p>keuangan pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi sistem informasi manajemen daerah. • Standar akuntansi pemerintah. • Sistem pengendalian internal. 	<p>(Didukung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAPD => KLKPD (Didukung) • PI => KLKPD (Didukung)
7	Tawaqal dan Suparno (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan. • Sistem pengendalian internal. • Sistem informasi akuntansi. • Kompetensi sumber daya manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> • PI => KLKPD (Didukung) • SI => KLKPD (Didukung) • KSDM => KLKPD
8	Megawati dan Sulindawati (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. • Kompetensi sumber daya manusia. • Pengelolaan keuangan daerah. • Sistem akuntansi keuangan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • KSDM => KLKPD (Didukung) • PKD => KLKPD (Didukung) • Sistem APD => KLKPD (Didukung)
9	Sholohah, Sulistyawati, dan Santoso (2019).	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. • Sistem akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> • PI => KLKPD (Didukung) • KSDM => KLKPD (Tidak Didukung) • Sistem APD =>

		keuangan. <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia. • Good government governance. • Pengawasan Internal. • Sistem akuntansi pemerintahan. 	KLKPD (Tidak didukung) <ul style="list-style-type: none"> • GGG => KLKPD (Tidak didukung) • SAK => KLKPD (Tidak didukung)
--	--	---	---

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, terkait SAP pada Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah bertindak seperti steward dalam teori *stewardship* yang diperlukan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan pemerintah. Dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan principal (Ikyarti & Aprila, 2019).

Putriasri & Abdullah (2017) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh secara positif. Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan akan semakin berkualitas jika standar akuntansi pemerintah diterapkan dengan baik. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Putri (2016), Latifah (2017), Putriasri & Abdullah (2017), Ikyarti & Aprila (2019) yang menyimpulkan bahwa pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara positif. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menerapkan standar

akuntansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kembali hubungan antara standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan daerah.

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.2 Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan menggunakan sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer (Fauziyah, 2019). Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah antara lain: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu otonomi daerah yang efektif serta bertanggung jawab (Nurillah & Muid, 2014a). Pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang maksimal menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif. Sebagai steward pada teori stewardship pemerintahan daerah diharapkan mampu membentuk dan menerapkan sistem akuntansi yang efektif dan efisien dalam penyusunan laporan keuangannya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah daerah.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) yang menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif. Penelitian ini didukung oleh Putriasri & Abdullah (2017), Utama (2017), dan Megawati (2015) yang

menyimpulkan bahwa pengaruh sistem keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut:

H2: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.3 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam organisasi SDM menjadi elemen yang sangat penting, sehingga pengelolaan SDM harus dilaksanakan secara maksimal supaya dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang kompeten untuk mewujudkannya. Sebagai upaya dalam mempelajari peran SDM di suatu organisasi merupakan tujuan dalam mempelajari kompetensi SDM, sehingga organisasi dapat memilih bagaimana pengembangan kompetensi dan potensi karyawan (Adhitama, 2017). Pemerintah bertindak sebagai steward dalam teori stewardship diharapkan mampu dalam membentuk kualitas SDM yang dimiliki dan dapat mengelola SDM dengan baik sehingga laporan keuangan yang berkualitas dapat terwujud yang sesuai kebutuhan principal.

Putriasri & Abdullah (2017), Utama (2017), Tawaqal & Suparno (2017), dan Megawati (2015) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara positif. SDM yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu keuangan terkait lainnya sangat diperlukan dalam pengelolaan bagian keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut:

H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

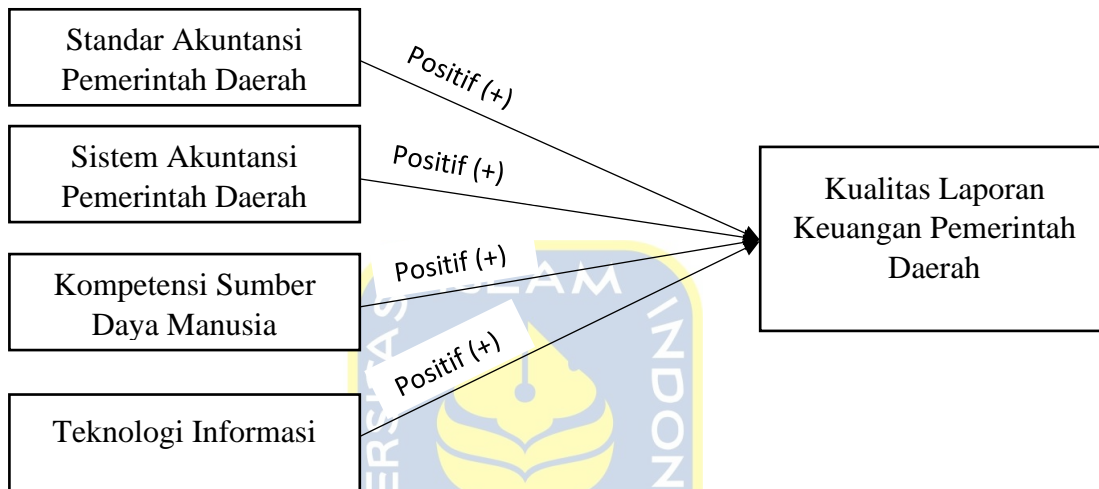
2.3.4 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan teknologi mengalami percepatan yang sangat signifikan di era digital ini. Teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis namun juga dapat diterapkan pada organisasi sektor publik termasuk pemerintahan daerah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa setelah menerapkan proses pembangunan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, penggunaan teknologi informasi juga dapat mengurangi jumlah kesalahan yang terjadi. Penggunaan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk memungkinkan suatu pemerintahan yang beroperasi secara terintegrasi dan mudah diakses antar unit bisnis pemerintah. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh SDM dapat dibantu dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Saat menjalankan tanggung jawabnya sebagai steward dalam teori stewardship, pemerintah daerah harus dapat menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini agar dapat mewujudkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik sehingga mampu melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik sesuai dengan kepentingan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utama (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Fauziyah (2019) karena menyatakan bahwa teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kembali hubungan antara Pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, diajukan hipotesis berikut:

H4: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa pernyataan hipotesis di atas, maka dapat digambarkan rerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tersebut merupakan penjabaran dari teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori stewardship. Dalam penelitian ini, teori stewardship menjelaskan untuk hubungan antara variabel kualitas laporan keuangan pemerintah dengan variabel standar akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah dan teknologi informasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman yang berjumlah 24 OPD. Pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sample* yang artinya penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan. Dalam penelitian ini kriteria sampelnya yaitu ASN di Kabupaten Pasaman yang berasal dari kepala bagian keuangan dan staf akuntansi serta kepala dinas, sekretaris, dan bendahara yang berjumlah 5 orang di setiap OPD-nya. Pemilihan sampel ini dikarenakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan di setiap OPD adalah kepala bagian keuangan dan staf akuntansi, selain itu kualitas laporan keuangan yang baik dapat dilihat dari kinerja bagian tersebut karena terlibat langsung dan memahami kegiatan akuntansi di pemerintah daerah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data subjek di mana data ini didapatkan dari pengalaman dan opini sekelompok atau seseorang yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini data akan didapatkan dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada ASN di bagian keuangan di setiap OPD di Kabupaten Pasaman sesuai dengan pengalaman dan opini dalam penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintahan Kabupaten Pasaman.

Data primer digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari sumbernya langsung tanpa adanya perantara. Dalam penelitian ini data didapatkan dengan membagikan Google Form berisi kuesioner terkait penyusunan laporan keuangan yang akan diisi secara langsung oleh ASN di bagian keuangan di setiap OPD di Kabupaten Pasaman.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Di dalam pengumpulannya akan menggunakan angket tertutup, di sini jawaban yang diberikan oleh responden berdasarkan jawaban yang disediakan oleh peneliti dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Pembagian kuesioner dilakukan secara langsung ke 24 OPD di Kabupaten Pasaman dengan mendatangi kantor terkait untuk pengisian kuesioner.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Kualitas laporan keuangan menjadi variabel dependen dalam penelitian ini.

a. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ikyarti & Aprila (2019) laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang mudah dipahami, memberikan informasi laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan, dan memberikan informasi yang andal yang tidak mengandung nilai yang menyesatkan atau kesalahan material. Selain itu, laporan keuangan ini juga bisa dibandingkan dengan peristiwa di masa lalu. Dalam penelitian ini, variabel diukur dengan cara penggunaan skala likert mulai nilai 5 (sangat setuju), nilai 4 (setuju), nilai 3 (netral), nilai 2 (tidak setuju), dan nilai 1 (sangat tidak setuju). Semakin tinggi perolehan nilai yang didapatkan maka dapat disimpulkan informasi laporan keuangan yang disusun OPD berkualitas. Pertanyaan untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan instrumen yang digunakan oleh Simbolon (2016).

3.4.2 Variabel Independen'

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat memengaruhi perubahan dalam variabel dependen (terikat) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif terhadap variabel dependen. Adapun dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Teknologi Informasi.

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut (Megawati et al., 2015) Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) adalah dasar-dasar dalam penerapan akuntansi untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintahan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini, variabel diukur dengan cara penggunaan skala likert mulai nilai 5 (sangat setuju), nilai 4 (setuju), nilai 3 (netral), nilai 2 (tidak setuju), dan nilai 1 (sangat tidak setuju). Semakin tinggi perolehan nilai yang didapatkan maka dapat disimpulkan informasi laporan keuangan yang disusun OPD berkualitas. Pertanyaan untuk variabel penerapan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Darus (2017).

b. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengintegrasikan proses akuntansi berupa proses pengklasifikasian, pencatatan, dan pengikhtisaran, serta pelaporan keuangan dibutuhkan suatu sistem akuntansi terkait keuangan organisasi untuk memperoleh informasi keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan pemangku kepentingan (Latifah, 2017). Dalam penelitian ini, variabel diukur dengan cara penggunaan skala likert mulai nilai 5 (sangat setuju), nilai 4 (setuju), nilai 3 (netral), nilai 2 (tidak setuju), dan nilai 1 (sangat tidak setuju). Semakin tinggi perolehan nilai yang didapatkan maka dapat disimpulkan informasi laporan keuangan yang disusun OPD berkualitas. Pertanyaan untuk variabel penerapan sistem akuntansi

pemerintah daerah mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Fikri dan Aida (2015).

c. Kompetensi Sumber Daya Manusia

SDM berfungsi sebagai *human capital* dalam organisasi, di mana kemampuan dan keterampilan orang-orang dalam organisasi dimanfaatkan untuk dapat bekerja secara profesional dan menciptakan keuntungan ekonomi. Ide dan inovasi dapat dihasilkan dari pengelolaan *human capital* yang baik (Utama, 2017). Dalam penelitian ini, variabel diukur dengan cara penggunaan skala likert mulai nilai 5 (sangat setuju), nilai 4 (setuju), nilai 3 (netral), nilai 2 (tidak setuju), dan nilai 1 (sangat tidak setuju). Semakin tinggi perolehan nilai yang didapatkan maka dapat disimpulkan informasi laporan keuangan yang disusun OPD berkualitas. Pertanyaan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Hutasuhut (2017).

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah teknologi yang melakukan pengolahan data, penerimaan data, penyusunan data, penyimpanan data, dan pengubahan fungsi data guna memperoleh informasi yang bermanfaat dan bermutu tinggi. Dalam penelitian ini, variabel diukur dengan cara penggunaan skala likert mulai nilai 5 (sangat setuju), nilai 4 (setuju), nilai 3 (netral), nilai 2 (tidak setuju), dan nilai 1 (sangat tidak setuju). Semakin tinggi perolehan nilai yang didapatkan maka dapat disimpulkan informasi laporan keuangan yang disusun OPD berkualitas. Pertanyaan untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Lilis (2016).

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Variabel yang diukur dalam kuesioner ini mencakup: Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Teknologi Informasi.

3.6 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah program SPSS yang merupakan sebuah program statistik yang berfungsi membantu dalam memproses data-data statistik secara cepat dan tepat, serta menghasilkan output yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan.

3.7 Teknik Analisis Data

Yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengujian hipotesis pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menggunakan data populasi tanpa analisis untuk memberikan gambaran tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan yang sesuai. Untuk mengetahui rata-rata, median, modus, standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimal, dan jumlah data penelitian dilakukan analisis deskriptif.

3.7.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Untuk mengukur apakah pernyataan yang akan diuji dalam penelitian valid atau sah sehingga mampu mengungkapkan apa yang akan diukur dalam kuesioner yang diberikan maka dilakukan uji validitas. Semakin tinggi validitas maka instrumen yang digunakan semakin baik, sebaliknya jika validitas

instrumen rendah maka instrumen yang digunakan kurang baik dan sebaiknya tidak digunakan dalam kelompok indikator.

Dengan membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} maka dapat ditentukan validitas dari instrumen yang digunakan. Suatu instrumen pernyataan bisa disimpulkan kevalidannya ketika nilai r_{hitung} positif dan lebih besar dari r_{tabel} dan tidak valid apabila r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} , sehingga instrumen tidak digunakan.

b. Uji Reliabilitas

Untuk menguji konsistensi dari instrumen penelitian ketika mengukur gejala yang sama dapat dilakukan dengan uji reliabilitas. Pengukuran instrumen yang hasilnya stabil menyatakan bahwa instrumen yang digunakan bersifat andal. Dalam menentukan reliabilitas, semua pernyataan yang sebelumnya sudah diuji kevalidannya selanjutnya ditentukan reliabilitasnya dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, nilai koefisien *Cronbach's Alpha* yang lebih dari 0,70 menyatakan bahwa pernyataan yang akan diuji reliabel.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diolah valid (tidak ada penyimpangan) dan mengikuti distribusi normal, serta layak digunakan dalam persamaan model regresi. Uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas digunakan sebagai uji asumsi klasik dalam penelitian ini.

a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah distribusi data mendekati distribusi normal dilakukan uji normalitas. Disini uji-t mengasumsikan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal. Pelanggaran asumsi ini membatalkan uji statistik karena tidak valid untuk ukuran sampel kecil. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikan 5%. Distribusi normal ditunjukkan dengan melihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi atau korelasi yang lengkap antara variabel-variabel independen dalam model regresi yang dibentuk dilakukan uji multikolinearitas. Model regresi yang baik dapat dilihat ketika tidak terjadinya korelasi di antara variabel independen menunjukkan model regresi yang baik. Untuk mendeteksi korelasi antara variabel independen dapat menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika angka *tolerance* di atas 0,1 dan $VIF < 10$ berarti tidak ditemukannya gejala multikolinearitas.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain dalam suatu model regresi. Jika *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, dikatakan homoskedastisitas, jika tidak dikatakan heteroskedastisitas. Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas menunjukkan model regresi yang baik. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat menggunakan uji *Glejser*. Apabila hasil probabilitas signifikansi dengan nilai di atas 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak. Dalam uji ini memakai analisis koefisien determinasi dan uji t.

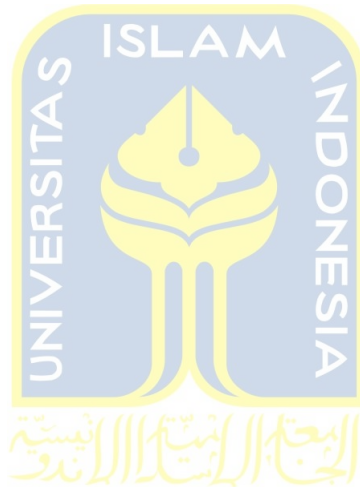
a. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependennya digunakan koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan semakin terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependennya.

b. Uji T

Untuk pengujian secara parsial pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya dilakukan uji T, dengan asumsi nilai konstan

untuk variabel lainnya. Adapun kriteria penilaian pengujian dengan tingkat level of significant $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak yang menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Profil Singkat Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam provinsi Sumatra Barat dengan ibu kota kabupatennya yang terletak di Lubuk Sikaping dengan luas wilayah 4.447,63 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 301.144 jiwa pada tahun 2021. Kata Pasaman sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti persamaan. Hal ini dikarenakan masyarakat heterogen dari berbagai suku yang tinggal di kabupaten ini. Selain itu, Kabupaten Pasaman juga memiliki nilai sejarah yang kuat dengan adanya perang paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melawan penjajah Belanda yang menjadi salah satu catatan sejarah perlawanan terhadap penjajah di berbagai daerah di Indonesia.

Sumber pendapatan Kabupaten Pasaman berasal dari sektor tanaman pangan. Kabupaten ini dikenal dengan produksi kelapa sawit yang cukup besar. Pada tahun 2000, Produksi kelapa sawit di Kabupaten Pasaman tercatat 788.446 ton dengan areal perkebunan seluas 78.387 hektar. Selain perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Pasaman juga dikenal sebagai salah satu penghasil minyak nilam terbaik di dunia.

Secara administrasi, terdapat 12 Kecamatan, 37 Nagari (Desa), dan 225 Jorong di Kabupaten Pasaman dengan kecamatan paling luas yaitu Kecamatan Mapat Tunggul dengan luas 605,29 Km² dan Kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan luas 69,56 Km².

4.1.2 Deskriptif Data Umum

Penelitian ini dilakukan kepada 24 OPD yang ada di Kabupaten Pasaman.

Dalam penelitian ini, responden berasal dari pegawai yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan OPD di Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Kasubag Keuangan, Staf Kasubag Keuangan, Bendahara, Sekretaris, dan Kepala Dinas. Pengajuan izin penelitian, penyebaran kuesioner, pengambilan kuesioner, hingga proses pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2022. Berdasarkan data yang dikumpulkan untuk penelitian, kuesioner dengan jumlah 120 dibagikan dan kembali dengan jumlah 106. Adapun gambaran data sampel sebagai berikut:

Tabel 2

Karakteristik Data Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan Kuesioner	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	120	100%
2	Kuesioner yang kembali	106	88,33%
3	Kuesioner yang tidak kembali	14	11,67%
4	Kuesioner yang dapat diolah	106	88,33%

Tabel 3

Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Nama OPD	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1	Badan Keuangan Daerah	5	5
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	4
3	Inspektorat	5	5
4	Sekretariat Daerah	5	3
5	Dinas Komunikasi dan Informasi	5	5
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	5

7	Dinas Pendidikan	5	5
8	Dinas Sosial	5	5
9	Badan Pembangunan Daerah	5	5
10	DP3APPKB	5	5
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	4
12	Dinas Lingkungan Hidup	5	5
13	Dinas Pertanian	5	5
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	5	5
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	5
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	4
17	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	5	5
18	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	5	4
19	Dinas Perhubungan	5	4
20	Dinas Pangan	5	4
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	3
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5	3
23	Dinas Kesehatan	5	4
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	4
Total		120	106

4.1.3 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berasal dari kepala Dinas, sekretaris, kepala sub-bagian keuangan, bendahara, dan staf sub bagian keuangan yang ada di 24 OPD di Pemerintah Kabupaten Pasaman. Karakteristik responden dalam dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan masa kerja.

- a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

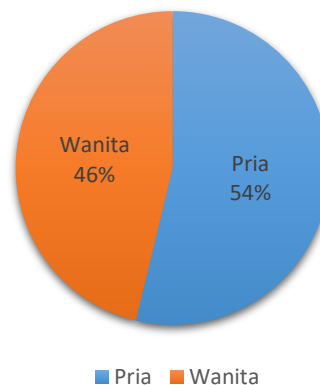
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	57	54%
Wanita	49	46%
Total	106	100%

Gambar 2 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin



Berdasarkan diagram pada gambar 2, responden pria terdiri dari 57 orang atau 54% dan sisanya 49 orang atau 46% berjenis kelamin wanita dari 106 total responden.

b. Deskripsi responden berdasarkan usia

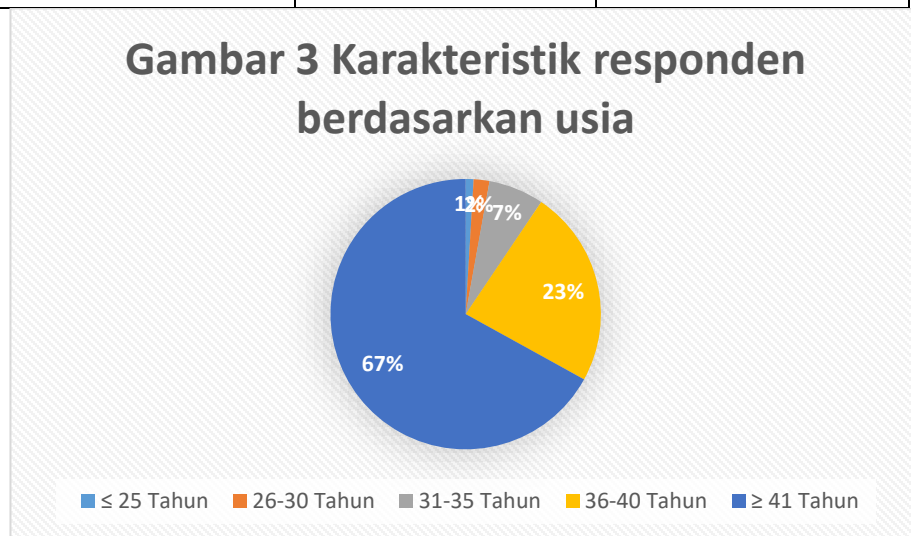
Berdasarkan usia responden dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5

Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia	Jumlah	Persentase
≤ 25 Tahun	1	1%
26-30 Tahun	2	2%
31-35 Tahun	7	7%
36-40 Tahun	25	24%
≥ 41 Tahun	71	67%
Total	106	100%

Gambar 3 Karakteristik responden berdasarkan usia



Berdasarkan diagram pada gambar 3, mayoritas responden berusia lebih dari 41 tahun dengan jumlah 71 atau 67%. Dan responden dengan jumlah terendah berusia di bawah 25 tahun yaitu 1 orang atau 1%. Responden dengan usia 26-30 tahun berjumlah 2 orang atau 2%, responden dengan usia 31-35 tahun berjumlah 7 orang atau 7%, responden dengan usia 36-40 tahun berjumlah 25 orang atau 24% dari 106 jumlah responden.

c. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir

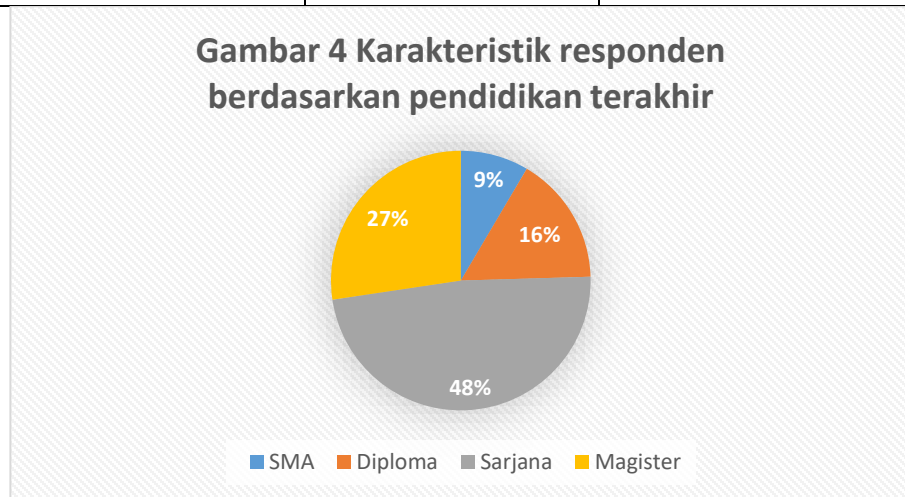
Berdasarkan pendidikan terakhir responden dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 6

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA	9	8%
Diploma	17	16%
Sarjana	51	48%
Magister	29	27%
Total	106	100%

Gambar 4 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir



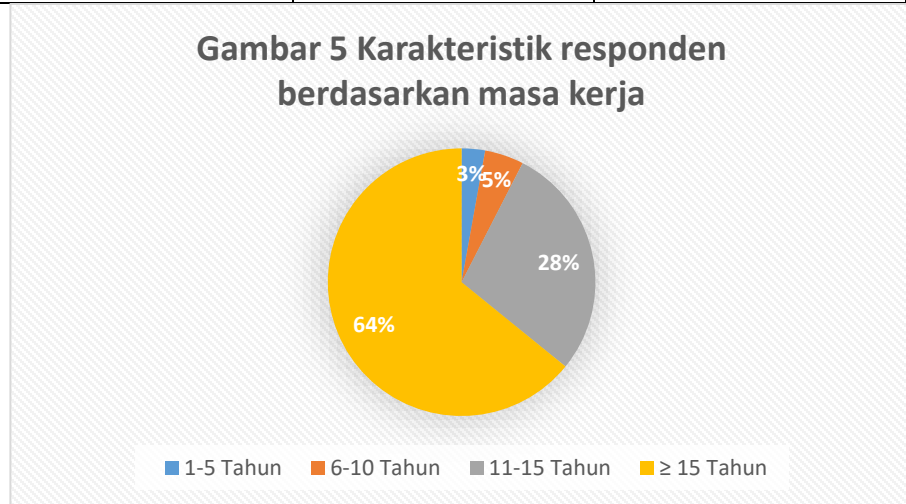
Berdasarkan diagram pada gambar 4, dapat dilihat sebagian besar dari responden memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dengan jumlah 51 orang atau 48%. Dan responden dengan jumlah terendah yaitu berpendidikan SMA yang berjumlah 9 orang atau 8%. 17 orang atau 16% dari responden dengan pendidikan terakhir diploma dan 29 orang atau 27% dari responden dengan pendidikan terakhir magister dari 106 jumlah responden.

- d. Deskripsi responden berdasarkan masa kerja

Tabel 7

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1-5 Tahun	3	3%
6-10 Tahun	5	5%
11-15 Tahun	30	28%
≥ 15 Tahun	68	64%
Total	106	100%



Berdasarkan diagram pada gambar 5, mayoritas responden memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun dengan jumlah 68 orang atau 64%. Dan responden dengan jumlah terendah memiliki masa kerja 1-5 tahun berjumlah 3 orang atau 3%. Responden dengan masa kerja 6-10 tahun berjumlah 5 orang atau 5% dan responden dengan masa kerja 11-15 tahun berjumlah 30 orang atau 28% dari 106 jumlah responden.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran terhadap objek penelitian dan mengambil kesimpulan yang sesuai digunakan analisis statistik deskriptif. Analisis ini menunjukkan jumlah penelitian, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari penelitian yang dilakukan terhadap semua variabel. Hasil analisis deskriptif dari penelitian dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8
Descriptive Statistics

Variabel Penelitian	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	106	3,56	5,00	4,1795	0,28785
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	106	3,50	5,00	4,1981	0,34316
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	106	3,70	5,00	4,2274	0,33253
Kompetensi Sumber Daya Manusia	106	3,00	5,00	4,0824	0,38142
Teknologi Informasi	106	3,71	5,00	4,2915	0,33512
Valid N (listwise)	106				

Berdasarkan Tabel 8 dijelaskan bahwa:

1. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki jumlah sampel sejumlah 106 dengan nilai minimum sebesar 3,56 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 4,17, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden di Pemerintah Kabupaten Pasaman menjawab setuju yang mengindikasikan telah membuat laporan keuangan dengan memenuhi indikator pembuatan laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Standar deviasi dari variabel ini adalah 0,287.
2. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki jumlah sampel sejumlah 106 dengan nilai minimum sebesar 3,50 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 4,19, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden di Pemerintah Kabupaten Pasaman menjawab setuju yang mengindikasikan pembuatan laporan keuangan di setiap OPD sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah yang ada. Standar deviasi dari variabel ini adalah 0,343.

3. Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki jumlah sampel sejumlah 106, nilai minimum yaitu 3,70 dan nilai maksimum yaitu 5. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 4,227, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden di Pemerintah Kabupaten Pasaman menjawab setuju yang mengindikasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang baik telah diterapkan di setiap OPD yang ada. Standar deviasi dari variabel ini adalah 0,332.
4. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki jumlah sampel sejumlah 106, nilai minimum yaitu 3 dan nilai maksimum yaitu 5. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 4,08, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden di Pemerintah Kabupaten Pasaman menjawab setuju yang mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia di setiap OPD sudah baik. Standar deviasi dari variabel ini adalah 0,381.
5. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki jumlah sampel sejumlah 106, nilai minimum yaitu 3,71 dan nilai maksimum yaitu 5. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 4,29 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden di Pemerintah Kabupaten Pasaman menjawab setuju yang mengindikasikan pemanfaatan teknologi informasi telah diterapkan dengan baik di setiap OPD. Standar deviasi dari variabel ini adalah 0,335.

4.3 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Untuk menguji validitas data instrumen penelitian dapat diuji dengan cara membandingkan antara nilai r_{hitung} dan r_{tabel} . Jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka item pernyataan dalam penelitian dapat dinyatakan valid. Penelitian ini melibatkan 106 responden, sehingga r_{tabel} untuk penelitian ini adalah 0,189. Setelah dilakukan pengujian, r_{hitung} dari setiap item pernyataan memiliki nilai di atas 0,189. Berdasarkan hasil uji ini, semua item pernyataan yang akan diuji untuk kelima variabel dapat dikatakan valid.

Hasil uji validitas terhadap butir-butir pernyataan dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

(X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) diuraikan pada tabel 9 berikut:

Tabel 9

**Uji Validitas Pernyataan-Pernyataan pada Kuesioner Variabel Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Item Pernyataan	Nilai r-hitung	Nilai r-tabel	Keterangan
1	0,415	0,189	Valid
2	0,645	0,189	Valid
3	0,626	0,189	Valid
4	0,645	0,189	Valid
5	0,436	0,189	Valid
6	0,620	0,189	Valid
7	0,676	0,189	Valid
8	0,639	0,189	Valid
9	0,606	0,189	Valid

Tabel 10

**Uji Validitas Pernyataan-Pernyataan pada Kuesioner Standar Akuntansi
Pemerintah Daerah**

Item Pernyataan	Nilai r-hitung	Nilai r-tabel	Keterangan
1	0,499	0,189	Valid
2	0,715	0,189	Valid
3	0,693	0,189	Valid
4	0,694	0,189	Valid
5	0,726	0,189	Valid
6	0,687	0,189	Valid

Tabel 11

**Uji Validitas Pernyataan-Pernyataan pada Kuesioner Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah**

Item Pernyataan	Nilai r-hitung	Nilai r-tabel	Keterangan
1	0,608	0,189	Valid
2	0,645	0,189	Valid
3	0,582	0,189	Valid
4	0,641	0,189	Valid
5	0,620	0,189	Valid
6	0,725	0,189	Valid
7	0,688	0,189	Valid
8	0,626	0,189	Valid
9	0,657	0,189	Valid
10	0,736	0,189	Valid

Tabel 12

**Uji Validitas Pernyataan-Pernyataan pada Kuesioner Kompetensi Sumber Daya
Manusia**

Item Pernyataan	Nilai r-hitung	Nilai r-tabel	Keterangan
1	0,608	0,189	Valid
2	0,613	0,189	Valid
3	0,588	0,189	Valid
4	0,788	0,189	Valid
5	0,784	0,189	Valid
6	0,831	0,189	Valid
7	0,786	0,189	Valid
8	0,736	0,189	Valid

Tabel 13

Uji Validitas Pernyataan-Pernyataan pada Kuesioner Pemanfaatan Teknologi Informasi

Item Pernyataan	Nilai r-hitung	Nilai r-tabel	Keterangan
1	0,545	0,189	Valid
2	0,708	0,189	Valid
3	0,729	0,189	Valid
4	0,755	0,189	Valid
5	0,648	0,189	Valid
6	0,718	0,189	Valid
7	0,550	0,189	Valid

b. Uji Reliabilitas

Setelah pernyataan diuji validitasnya, uji reliabilitas dilakukan untuk menguji tingkat konsistensi dari instrumen penelitian apabila mengukur gejala yang sama dan berfungsi sebagai alat ukur variabel yang bisa dipercaya. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* dari instrumen pernyataan yang sudah valid dalam uji validitas. Jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70 maka instrumen pernyataan dinyatakan reliabel. Setelah dilakukan pengujian setiap variabel memiliki nilai lebih dari 0,70, hal ini menunjukkan instrumen penelitian dalam setiap variabel dinyatakan reliabel.

Hasil uji reliabilitas terhadap butir-butir pernyataan dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 14
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
----------	-------------------------	--------------------	------------

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,755	0,70	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	0,748	0,70	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,850	0,70	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,868	0,70	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,787	0,70	Reliabel

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data yang diolah mendekati distribusi normal dilakukan uji normalitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat nilai signifikansi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai signifikansi yang bernilai lebih dari 0,05 menunjukkan distribusi data adalah normal dan sebaliknya jika lebih kecil dari 0,05 berarti distribusi data adalah tidak normal. Berdasarkan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* yang dilakukan, nilai signifikansi dari data yang diolah adalah 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel 15 berikut:

Tabel 15

Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
n		106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,88248088
Most Extreme Differences	Absolute	0,066
	Positive	0,066
	Negative	-0,062
Test Statistic		0,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Untuk menguji apakah adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi yang dibentuk dilakukan uji multikolinearitas. Model regresi yang baik ditunjukkan dengan tidak terjadinya multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai Tolerance. Suatu data dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas ketika nilai Tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Nilai Tolerance	Batasan tolerance (>0,1)	Nilai VIF	Batasan VIF (<10)	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	0,660	0,1	1,515	10	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0,614	0,1	1,627	10	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,772	0,1	1,295	10	Tidak terjadi Multikolinearitas
Teknologi Informasi	0,730	0,1	1,369	10	Tidak terjadi Multikolinearitas

- a. Nilai Tolerance Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah adalah 0,660 yang lebih besar dari 0,1. Sedangkan untuk nilai VIF yaitu 1.515 yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan uji ini tidak terjadi multikolinearitas untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
- b. Nilai Tolerance Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah 0,614 yang lebih besar dari 0,1. Sedangkan untuk nilai VIF yaitu 1.627 yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan uji ini tidak terjadi multikolinearitas untuk variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah.

- c. Nilai Tolerance Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah 0,772 yang lebih besar dari 0,1. Sedangkan untuk nilai VIF yaitu 1.295 yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan uji ini tidak terjadi multikolinearitas untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- d. Nilai Tolerance Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah 0,730 yang lebih besar dari 0,1. Sedangkan untuk nilai VIF yaitu 1.369 yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan uji ini tidak terjadi multikolinearitas untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji Heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual variabel satu dengan yang lainnya dalam suatu model regresi. Tidak terjadinya heteroskedastisitas (homoskedastisitas) menunjukkan model regresi yang baik. Uji *Glejser* dapat dilakukan untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya di atas 5%, heteroskedastisitas tidak terjadi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 17 berikut:

Tabel 17
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Nilai Signifikansi	Batas Signifikansi	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	0,097	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0,359	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,922	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Teknologi Informasi	0,430	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

- a. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki nilai significance

- 0,097 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas).
- b. Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki nilai significance 0,359 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji ini disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas).
 - c. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai significance 0,922 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji ini disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas).
 - d. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai significance 0,430 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas).

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur seberapa jauh atau kuat variabel independen yaitu standar akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah digunakan uji koefisien determinasi. Untuk melihat koefisien determinasi dapat dilakukan dengan melihat nilai *R Square* sehingga dapat dilihat bagaimana variabel independen menerangkan variabel dependennya. Uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	,688 ^a	0,474	0,453	1,919
---	-------------------	-------	-------	-------

Berdasarkan tabel 18 di atas, Adjusted R Square diketahui sebesar 0,453, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel independen yaitu Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 45,3%. Sedangkan sebesar 54,7% dijelaskan faktor lain yang tidak diteliti untuk penelitian ini.

4.5.2 Uji T

Untuk pengujian secara parsial pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya dilakukan uji T, dengan asumsi nilai konstan untuk variabel lainnya. Dalam melakukan pengujian ini, dapat dengan melihat *p value*. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis ditolak. Hasil dari uji T dapat dilihat pada tabel 19 berikut:

Tabel 19. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,091	0,340		3,204	0,002
	Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	0,319	0,075	0,381	4,280	0,000
	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0,183	0,080	0,212	2,297	0,024
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,173	0,062	0,229	2,787	0,006
	Teknologi Informasi	0,063	0,073	0,073	0,863	0,390

- a. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Kesimpulan ini diambil dengan melihat nilai signifikansi sebesar 0,000 di mana lebih kecil dari 0,05.
- b. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Kesimpulan ini diambil dengan melihat nilai signifikansi sebesar 0,024 di mana lebih kecil dari 0,05.
- c. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Kesimpulan tersebut diambil dengan melihat nilai signifikansi yaitu 0,006 di mana lebih kecil dari 0,05.
- d. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Kesimpulan tersebut diambil dengan melihat nilai signifikansi yaitu 0,390 di mana lebih besar dari 0,05.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap variabel penerapan standar akuntansi pemerintah daerah dengan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disimpulkan terdapat pengaruh secara positif antara dua variabel ini. Hal ini dibuktikan dengan melihat signifikansi dalam uji T sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai koefisien regresinya ke arah positif sehingga hipotesis 1 yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima. Penerapan standar akuntansi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Pasaman menunjukkan faktor ini mampu

menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan membuktikan bahwa setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilihat dari jawaban responden yang telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar, dan pengoreksian kesalahan yang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah daerah seharusnya menerapkan standar akuntansi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan di setiap OPD nya sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada pegawai di bidang keuangan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016), Latifah (2017), Putriasri & Abdullah (2017), dan Ikyarti & Aprilia (2019) yang menyimpulkan bahwa pengaruh Standar Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas serta mengurangi risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

4.6.2 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disimpulkan terdapat pengaruh secara positif antara dua variabel ini. Hal ini dibuktikan dengan melihat signifikansi dalam uji T sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai koefisien regresinya ke arah positif sehingga hipotesis 2 yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah dapat diterima. Sistem akuntansi yang baik dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dalam proses pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan transaksi dapat dilakukan dengan tepat dan akurat. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang baik dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah kedepannya. Dari jawaban responden dalam penelitian ini, sistem akuntansi sudah diterapkan dengan melakukan analisis identifikasi transaksi yang didukung oleh bukti transaksi, pencatatan secara kronologis, pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi, serta pembuatan laporan keuangan secara konsisten dan periodik.

Berdasarkan penelitian ini, pemerintah daerah sebaiknya membentuk dan menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai dengan undang-undang. Sehingga dapat lebih sistematis dalam proses penyusunan laporan keuangan dan dapat menghasilkan laporan keuangan dengan tepat waktu dengan kualitas yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan sistem akuntansi di setiap OPD di pemerintah daerah serta melakukan pengendalian Internal agar sistem akuntansi ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten diterapkan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Putriasri & Abdullah (2017), Utama (2017), dan Megawati (2015) yang menyimpulkan bahwa pengaruh sistem keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan penerapan sistem akuntansi ini mampu mengurangi risiko salah saji material dalam laporan keuangan sehingga pengguna dapat memanfaatkannya sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan yang andal. Hal ini menunjukkan semakin baik sistem akuntansi yang diterapkan maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

4.6.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan variabel kompetensi sumber daya manusia

disimpulkan terdapat pengaruh positif antara dua variabel ini. Hal ini dibuktikan dengan melihat signifikansi dalam uji T sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai koefisien regresinya ke arah positif sehingga hipotesis 3 yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima. Sumber daya manusia yang kompeten akan mendukung dalam pembuatan laporan keuangan yang tepat waktu dengan pengerjaan yang efisien dan efektif. Keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman dalam proses akuntansi dibutuhkan untuk mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik. Dari jawaban responden dalam penelitian ini, pegawai yang ditempatkan di bagian keuangan telah mengerti peran dan fungsi dalam pengelolaan keuangan dan proses akuntansi, mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan keuangan, dan memiliki pengalaman di bidang akuntansi.

Berdasarkan penelitian ini, kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Hal ini dapat diterapkan dengan menempatkan pegawai dengan latar belakang akuntansi di bidang keuangan serta memberikan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan bagi pegawai yang baru masuk sehingga dalam proses pembuatan laporan keuangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dikarenakan pegawai yang sudah memahami dengan baik tugas yang harus dikerjakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Putriasri & Abdullah (2017), Utama (2017), Tawaqal & Suparno (2017), dan Megawati (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan semakin baik kompetensi SDM yang dimiliki, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

4.6.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap variabel penerapan pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disimpulkan terdapat pengaruh positif antara dua variabel ini. Hal

ini dibuktikan dengan melihat signifikansi dalam uji T sebesar 0,390 yang lebih besar dari 0,05, serta nilai koefisien regresinya ke arah negatif sehingga hipotesis 4 yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditolak. Walaupun teknologi informasi telah diterapkan di pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, namun hal ini tidak menjadi faktor yang membuat laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten ini menjadi berkualitas. Dalam penerapannya masih ada pegawai yang belum siap dalam menggunakan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan, selain itu dari data yang didapatkan sebagian besar pegawai yang telah berusia lebih dari 41 tahun sebanyak 67% dari total data yang dikumpulkan. Hal ini menyebabkan potensi terdapat kesulitan dalam penggunaan teknologi informasi yang baru oleh para karyawan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah sebaiknya memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada pegawai-pegawai yang masih belum memahami penggunaan fasilitas teknologi informasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan dengan maksimal. Dari jawaban responden dalam penelitian ini, masih terdapat kekurangan dalam penerapan teknologi informasi, seperti misalnya jadwal pemeliharaan fasilitas komputer dan internet kurang teratur.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Fauziyah (2019) yang menyimpulkan tidak ada pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman belum dapat memengaruhi penyediaan laporan keuangan yang berkualitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap variabel dependen dan variabel independen maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

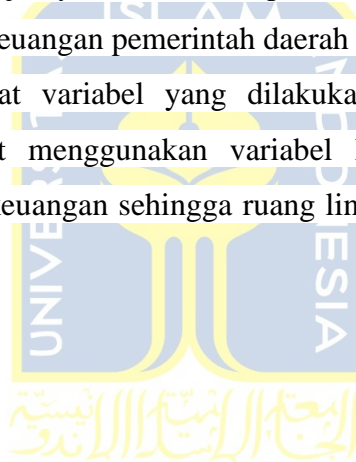
1. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah daerah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan lebih baik.
2. Variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan semakin baik sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan lebih baik.
3. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan lebih baik.
4. Variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman diharapkan dapat meningkatkan dan lebih memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan dengan pemeliharaan peralatan secara teratur dan mengganti peralatan yang sudah rusak, meningkatkan penggunaan internet sehingga dapat membantu pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan

efektif dan efisien, serta memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai penggunaan teknologi informasi.

2. Bagi pemerintah daerah untuk dapat menerapkan standar akuntansi pemerintah daerah dalam pembuatan laporan keuangan, dan menggunakan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan di setiap OPD nya, serta menjaga kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan serta menempatkan pegawai dengan latar belakang akuntansi di bidang keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan dengan tepat waktu dan memiliki kualitas yang baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, berdasarkan penelitian ini faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hanya dapat dijelaskan sebanyak 45,3% dari empat variabel yang dilakukan pengujian. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga ruang lingkup penelitian dapat lebih luas lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, S. 2017. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Darus, M. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah, dan Implementasi Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan pengendalian Internal sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Skripsi. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CE Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1),49–64.
- Fauziyah, E. M. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*.
- Fikri, A. 2015. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada seluruh SKPD di Provinsi Sumatra Utara). Skripsi: Universitas Sumatra Utara.
- Hutasuhut, R. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Skripsi. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Ikyarti, T., & Aprilia, N. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*.
- Kharis, A. 2010. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Peaksanaan sistem Pengendalian Internal Terhadap PT. Avia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Latifah, A. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*.

- Lillrank, P. 2003. The quality of information. *International Journal of Quality and Reliability Management*, 20(6), 691–703.
- Megawati, L. K. S., Sulindawati, N., & Sujana, E. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Nurillah, A. S., & Muid, D. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Putri, A. M., Kirmizi, K., & Basri, Y. M. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ekonomi*.
- Putriasri, P., & Abdullah, T. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal/Voume VI*.
- Republik Indonesia. 2003. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004. Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010. Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, 2006; 16-17. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Setyowati. 2016. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Kinerja* Volume 200 No.2 Th. 2016
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. 2019. Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45.

- Simbolon, A. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Skripsi. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Tawaqal, I., & Suparno, S. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Utama, R. J. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Universitas Riau*.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Kueisoner Penelitian

KUEISONER PENELITIAN

Perihal: Permohonan Pengisian Kueisoner

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/i Responden Pegawai Bidang Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman

Melalui kesempatan ini, perkenalkan saya Anindito Bagus Yulianto, mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman”**. Bersama ini, saya mohon Bapak/ Ibu/ Saudara/ i untuk menjadi responden dan meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kueisoner penelitian dengan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan.

Kueisoner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik. Sehubungan dengan hal ini, diharapkan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i menjawab pertanyaan secara objektif, jujur, dan apa adanya. Jawaban yang diberikan tidak akan mempengaruhi kinerja dan karir Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dan jawaban tidak ada yang bernilai benar atau salah. Sesuai dengan kode etik dalam penelitian, kerahasiaan jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara/ i akan saya jaga.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i yang telah meluangkan waktunya untuk pengisian kueisoner ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Hormat saya,

Anindito Bagus Yulianto

KUISONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Kuisoner

1. Pengisian kuisoner dilakukan oleh pegawai bidang keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman.
2. Sebelum menjawab kuisoner, mohon untuk melengkapi identitas responden dengan mengisikan nama, jenis kelamin, usia, jabatan, OPD tempat bekerja, pendidikan terakhir, dan lama bekerja.
3. Untuk menjawab kuisoner, pilihlah salah satu jawaban yang sesuai pada kolom pilihan jawaban yang tersedia, dengan keterangan sebagai berikut:
SS: Sangat Setuju (5)
S: Setuju (4)
N: Netral (3)
TS: Tidak Setuju (2)
STS: Sangat Tidak Setuju (1)
4. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, setiap pernyataan hanya boleh diisi satu jawaban.
5. Tidak ada jawaban yang salah. Mohon usahakan agar menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan tinggi sehingga tidak mengosongkan satu pun jawaban.



Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Usia : ≤ 25 Tahun 26-30 Tahun

31-35 Tahun 36-40 Tahun

≥ 41 Tahun

Jabatan :

OPD :

Pendidikan Terakhir :

SMA

Sarjana

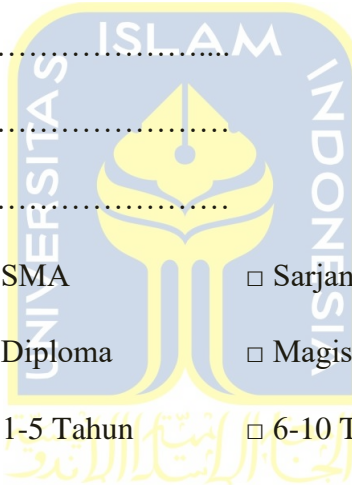
Lainnya

Diploma

Magister

Masa Kerja : 1-5 Tahun 6-10 Tahun

11-15 Tahun ≥ 15 Tahun

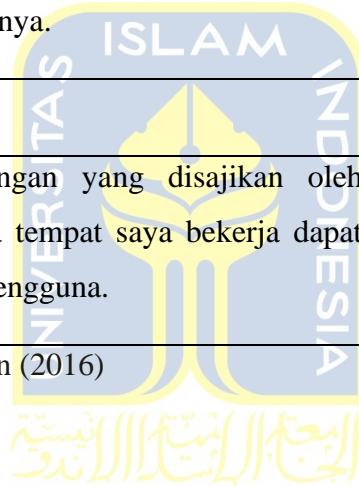


1. Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan

NO	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Relevan						
1	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi /lembaga tempat saya bekerja memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.					
2	Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.					
3	Instansi / lembaga tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap.					
Andal						
4	Transaksi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.					
5	Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material.					
6	Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk					

	kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.					
7	Di tempat saya bekerja informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji.					
Dapat Dibandingkan						
8	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
Dapat Dipahami						
9	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna.					

Sumber: Simbolon (2016)



2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran (LRA) menggunakan akuntansi berbasis akrual.					
2	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).					
3	Saya selalu menyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.					
4	Catatan atas laporan keuangan OPD yang saya susun selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan.					
5	Saya selalu melakukan koreksi terhadap setiap kesalahan yang ditemukan berdasarkan SAP.					
6	Saya selalu mengoreksi kesalahan yang tidak berulang melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.					

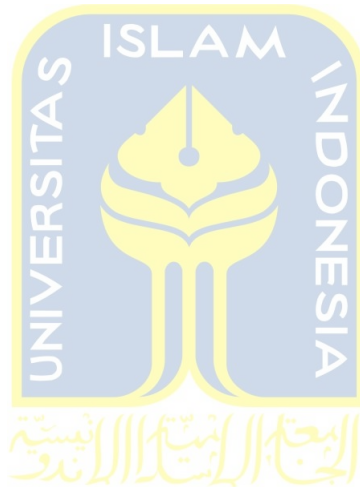
Sumber: Darus (2017)

3. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Sistem Akuntansi Keuangan pada Instansi ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.					
2	Setiap transaksi keuangan pada Instansi ini dilakukan dengan analisis transaksi / identifikasi transaksi.					
3	Pada Instansi ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan.					
4	Setiap transaksi keuangan pada Instansi ini didukung oleh bukti transaksi.					
5	Pada Instansi ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.					
6	Pada Instansi ini dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi.					
7	Pada Instansi ini dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya.					
8	Sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan.					
9	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi.					

10	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.					
----	---	--	--	--	--	--

Sumber: Fikri, Aida (2015)



4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya telah mengerti peran dan fungsi yang jelas dalam pengelolaan keuangan.					
2	Saya menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.					
3	Saya bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang telah ada.					
4	Saya telah mendapatkan pelatihan untuk dapat menunjang kemampuan bekerja pada bidang akuntansi.					
5	Saya memahami materi pelatihan yang diberikan.					
6	Materi pelatihan yang saya ikuti diberikan sesuai kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan.					
7	Saya memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang akuntansi.					
8	Saya sudah berpengalaman dalam bidang akuntansi, sehingga dapat membantu mengurangi kesalahan dalam bekerja.					

Sumber: Hutasuhut (2017)

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Sub bagian keuangan (akuntansi/anggaran) memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.					
2	Jaringan internet telah terpasang di unit tempat saya bekerja.					
3	Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.					
4	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
5	Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
6	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.					
7	Peralatan yang rusak/usang didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.					

Sumber: Lilis (2016)

Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Ahmad Yani No.34, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
Telp. (0753) 20090, Fax. (0753) 20090
email: dpmpstppasaman@gmail.com web: <https://dpmpstppasamankab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No : 017/ DPMPSTP/ I/ 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Perihal : Permohonan Izin Penelitian, Nomor : 215/DEK/10/Div.URT/I/2022, Tanggal 12 Januari 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anindito Bagus Yulianto
No. BP : 18312288
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : S1
Alamat : Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja

Akan melaksanakan kegiatan Penelitian Pada :

Lokasi : SKPD se-Kabupaten Pasaman
Waktu : Januari s/d Maret 2022
Dalam Rangka : Penyusunan Skripsi
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah , Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian
2. Dalam melakukan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Menatuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.
5. Mengirimkan hasil penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 18 Januari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN

Dra. YUSNIMAR, Apt
NIP. 19650606 199303 2 006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Bupati Pasaman (sebagai laporan)
- 2 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman
- 3 Kepala SKPD se-Kabupaten Pasaman
- 4 Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
- 5 Arsip

Lampiran 3: Gambaran Umum Responden

Nomor	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan	OPD	Pendidikan terakhir	Masa kerja
1	Wanita	36-40 Tahun	Staf	Badan Keuangan Daerah	Diploma	11-15 Tahun
2	Wanita	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	Badan Keuangan Daerah	Sarjana	≥ 15 Tahun
3	Pria	31-35 Tahun	Bendahara	Badan Keuangan Daerah	Sarjana	11-15 Tahun
4	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Badan Keuangan Daerah	Magister	≥ 15 Tahun
5	Wanita	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Badan Keuangan Daerah	Magister	≥ 15 Tahun
6	Wanita	36-40 Tahun	Kasubag keuangan	BKPSDM	Sarjana	≥ 15 Tahun
7	Wanita	36-40 Tahun	Bendahara	BKPSDM	Sarjana	11-15 Tahun
8	Pria	36-40 Tahun	Staf	BKPSDM	Diploma	11-15 Tahun
9	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	BKPSDM	Sarjana	≥ 15 Tahun
10	Wanita	≥ 41 Tahun	Staf	Inspektorat	SMA	≥ 15 Tahun
11	Pria	36-40 Tahun	Kasubag keuangan	Inspektorat	Magister	≥ 15 Tahun
12	Pria	≥ 41 Tahun	Bendahara	Inspektorat	Sarjana	11-15 Tahun
13	Pria	≥ 41 Tahun	Inspektur	Inspektorat	Magister	≥ 15 Tahun
14	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Inspektorat	Sarjana	≥ 15 Tahun
15	Pria	≥ 41 Tahun	Bendahara	Sekretariat Daerah	Sarjana	11-15 Tahun
16	Pria	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	Sekretariat Daerah	Sarjana	≥ 15 Tahun
17	Wanita	≥ 41 Tahun	Staf	Sekretariat Daerah	Sarjana	≥ 15 Tahun
18	Wanita	≥ 41 Tahun	Bendahara	Kominfo	Sarjana	≥ 15 Tahun
19	Wanita	31-35 Tahun	Staf	Kominfo	Diploma	11-15 Tahun
20	Pria	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	Kominfo	Sarjana	≥ 15 Tahun
21	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Kominfo	Sarjana	≥ 15 Tahun
22	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Kominfo	Sarjana	≥ 15 Tahun
23	Wanita	≤ 25 Tahun	Staf	DPMPSTP	SMA	1-5 Tahun

24	Wanita	36-40 Tahun	Kasubag keuangan	DPMPTSP	Sarjana	≥ 15 Tahun
25	Pria	≥ 41 Tahun	Bendahara	DPMPTSP	Magister	≥ 15 Tahun
26	Wanita	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	DPMPTSP	Magister	≥ 15 Tahun
27	Wanita	≥ 41 Tahun	Sekretaris	DPMPTSP	Magister	≥ 15 Tahun
28	Wanita	≥ 41 Tahun	Staf	Dinas Pendidikan	Sarjana	≥ 15 Tahun
29	Pria	36-40 Tahun	Bendahara	Dinas Pendidikan	SMA	≥ 15 Tahun
30	Wanita	31-35 Tahun	Kasubag keuangan	Dinas Pendidikan	Diploma	11 -15 Tahun
31	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan	Magister	≥ 15 Tahun
32	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Dinas Pendidikan	Magister	≥ 15 Tahun
33	Wanita	26-30 Tahun	Staf	Dinas Sosial	Diploma	1-5 Tahun
34	Wanita	≥ 41 Tahun	Bendahara	Dinas Sosial	Sarjana	≥ 15 Tahun
35	Wanita	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	Dinas Sosial	Sarjana	≥ 15 Tahun
36	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Dinas Sosial	Magister	≥ 15 Tahun
37	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Dinas Sosial	Magister	≥ 15 Tahun
38	Wanita	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	Bappeda	Sarjana	≥ 15 Tahun
39	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Bappeda	Magister	≥ 15 Tahun
40	Wanita	≥ 41 Tahun	Bendahara	Bappeda	Magister	≥ 15 Tahun
41	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Bappeda	Magister	≥ 15 Tahun
42	Pria	≥ 41 Tahun	Staf	Bappeda	Sarjana	11 -15 Tahun
43	Wanita	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	DP3APPKB	SMA	≥ 15 Tahun
44	Wanita	26-30 Tahun	Staf	DP3APPKB	SMA	1-5 Tahun
45	Pria	36-40 Tahun	Bendahara	DP3APPKB	Sarjana	11-15 Tahun
46	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	DP3APPKB	Magister	≥ 15 Tahun
47	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	DP3APPKB	Magister	≥ 15 Tahun
48	Wanita	36-40 Tahun	Kasubag keuangan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Magister	11-15 Tahun

49	Wanita	≥ 41 Tahun	Bendahara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SMA	≥ 15 Tahun
50	Pria	31-35 Tahun	Staf	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sarjana	6-10 Tahun
51	Wanita	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Magister	≥ 15 Tahun
52	Wanita	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	DLHPKP	SMA	≥ 15 Tahun
53	Wanita	36-40 Tahun	Bendahara	DLHPKP	Sarjana	11-15 Tahun
54	Wanita	≥ 41 Tahun	Staf	DLHPKP	Diploma	≥ 15 Tahun
55	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	DLHPKP	Sarjana	≥ 15 Tahun
56	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	DLHPKP	Magister	≥ 15 Tahun
57	Wanita	31-35 Tahun	Bendahara	Dinas Pertanian	Diploma	11-15 Tahun
58	Wanita	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	Dinas Pertanian	Sarjana	11-15 Tahun
59	Wanita	≥ 41 Tahun	Staf	Dinas Pertanian	Sarjana	11-15 Tahun
60	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Dinas Pertanian	Sarjana	≥ 15 Tahun
61	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Dinas Pertanian	Sarjana	≥ 15 Tahun
62	Wanita	31-35 Tahun	Bendahara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Sarjana	11-15 Tahun
63	Wanita	36-40 Tahun	Staf	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Diploma	11-15 Tahun
64	Pria	36-40 Tahun	Kasubag keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Diploma	≥ 15 Tahun
65	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Magister	≥ 15 Tahun
66	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Sarjana	≥ 15 Tahun
67	Pria	36-40 Tahun	Kasubag keuangan	Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang	Sarjana	11-15 Tahun
68	Wanita	36-40 Tahun	Bendahara	Dinas Pekerjaan Umum dan tata	Sarjana	11-15 Tahun

				ruang		
69	Wanita	≥ 41 Tahun	Staf	Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang	SMA	≥ 15 Tahun
70	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang	Magister	≥ 15 Tahun
71	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang	Magister	≥ 15 Tahun
72	Wanita	36-40 Tahun	Bendahara	Dukcapil	Sarjana	11-15 Tahun
73	Wanita	36-40 Tahun	Kasubag keuangan	Dukcapil	Sarjana	≥ 15 Tahun
74	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Dukcapil	Magister	≥ 15 Tahun
75	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Dukcapil	Magister	≥ 15 Tahun
76	Wanita	36-40 Tahun	Bendahara	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Diploma	11-15 Tahun
77	Pria	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Sarjana	≥ 15 Tahun
78	Wanita	36-40 Tahun	Staf	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Diploma	6-10 Tahun
79	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Magister	≥ 15 Tahun
80	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Sarjana	≥ 15 Tahun
81	Pria	≥ 41 Tahun	Bendahara	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Sarjana	11-15 Tahun
82	Wanita	≥ 41 Tahun	Staf	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Sarjana	6-10 Tahun
83	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Magister	≥ 15 Tahun
84	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Sarjana	≥ 15 Tahun
85	Wanita	36-40 Tahun	Bendahara	Dinas Perhubungan	Diploma	11-15 Tahun
86	Pria	≥ 41 Tahun	Staf	Dinas Perhubungan	Diploma	≥ 15 Tahun
87	Wanita	36-40	Kasubag	Dinas Perhubungan	Sarjana	11-15

		Tahun	keuangan			Tahun
88	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	Sarjana	≥ 15 Tahun
89	Wanita	31-35 Tahun	Bendahara	Dinas Pangan	Diploma	6-10 Tahun
90	Pria	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	Dinas Pangan	Diploma	11-15 Tahun
91	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Dinas Pangan	Magister	≥ 15 Tahun
92	Pria	≥ 41 Tahun	Sekretaris	Dinas Pangan	Sarjana	≥ 15 Tahun
93	Pria	36-40 Tahun	Bendahara	BPBD	Sarjana	11-15 Tahun
94	Pria	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	BPBD	Sarjana	≥ 15 Tahun
95	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Badan	BPBD	Magister	≥ 15 Tahun
96	Wanita	36-40 Tahun	Bendahara	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sarjana	11-15 Tahun
97	Pria	≥ 41 Tahun	Staf	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	SMA	≥ 15 Tahun
98	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Magister	≥ 15 Tahun
99	Wanita	36-40 Tahun	Kasubag keuangan	Dinas Kesehatan	Sarjana	11-15 Tahun
100	Pria	≥ 41 Tahun	Staf	Dinas Kesehatan	Diploma	≥ 15 Tahun
101	Wanita	≥ 41 Tahun	Bendahara	Dinas Kesehatan	Sarjana	≥ 15 Tahun
102	Pria	36-40 Tahun	Sekretaris	Dinas Kesehatan	Sarjana	11-15 Tahun
103	Wanita	≥ 41 Tahun	Kasubag keuangan	DPPPA	Sarjana	6-10 Tahun
104	Pria	≥ 41 Tahun	Kepala Dinas	DPPPA	Sarjana	≥ 15 Tahun
105	Wanita	≥ 41 Tahun	Sekretaris	DPPPA	Sarjana	≥ 15 Tahun
106	Wanita	36-40 Tahun	Staf	DPPPA	Diploma	11-15 Tahun

Lampiran 4: Jawaban Kueisoner

Jawaban Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nomor	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Rata-rata
1	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3,78
2	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3,78
3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4,00
4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4,67
5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4,33
6	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4,89
7	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4,89
8	4	5	5	4	3	3	4	4	4	4,00
9	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4,22
10	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4,78
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
12	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4,22
13	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4,22
14	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4,00
15	4	4	4	4	2	2	4	4	4	3,56
16	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4,22
17	4	5	5	5	4	3	5	4	4	4,33
18	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,89
19	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3,89
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
21	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4,00
22	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4,22
23	4	5	5	4	3	4	4	5	4	4,22
24	4	5	5	4	3	4	4	5	4	4,22
25	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4,11
26	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4,22
27	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4,33
28	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4,44
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
30	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4,33
31	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4,44
32	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4,11
33	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4,67
34	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4,89
35	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4,89

36	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4,11
37	4	4	4	4	3	3	4	4	5	3,89
38	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4,11
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
41	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4,11
42	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4,11
43	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3,67
44	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4,11
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
46	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4,33
47	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4,11
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
49	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4,22
50	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4,33
51	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4,11
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
54	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4,33
55	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4,11
56	3	4	4	4	5	4	4	4	5	4,11
57	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4,67
58	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3,67
59	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4,11
60	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4,22
61	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4,33
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
63	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,89
64	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,89
65	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4,22
66	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4,00
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
68	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4,22
69	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4,11
70	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4,22
71	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4,11
72	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4,00
73	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3,78
74	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4,11

75	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4,44
76	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4,11
77	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3,89
78	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4,11
79	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3,78
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
81	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4,22
82	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4,22
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
84	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4,22
85	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4,22
86	5	4	4	4	3	4	4	5	4	4,11
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
88	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4,22
89	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4,22
90	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4,33
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
92	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4,00
93	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4,11
94	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4,11
95	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4,33
96	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4,00
97	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4,11
98	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4,33
99	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,89
100	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4,00
101	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4,33
102	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4,33
103	4	3	4	4	5	3	4	4	4	3,89
104	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4,11
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
106	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4,33

Jawaban Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Nomor	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Rata-rata
1	4	4	4	4	4	4	4,00
2	4	4	4	4	4	4	4,00
3	4	4	4	3	4	3	3,67
4	4	4	4	4	4	4	4,00

5	5	5	5	5	4	4	4,67
6	5	5	5	5	4	5	4,83
7	5	5	5	5	5	5	5,00
8	5	5	4	4	4	4	4,33
9	5	4	4	5	4	4	4,33
10	5	5	5	4	5	4	4,67
11	1	5	5	5	5	5	4,33
12	4	4	4	4	5	4	4,17
13	4	4	4	5	5	5	4,50
14	4	4	4	4	3	3	3,67
15	4	4	3	3	4	4	3,67
16	5	5	5	5	5	5	5,00
17	5	5	5	5	5	4	4,83
18	4	4	4	4	3	3	3,67
19	4	4	4	4	3	3	3,67
20	4	5	5	5	4	4	4,50
21	4	5	4	5	5	5	4,67
22	4	4	4	5	4	4	4,17
23	4	4	5	5	4	4	4,33
24	4	4	5	5	4	4	4,33
25	4	4	4	4	4	4	4,00
26	4	5	5	5	5	5	4,83
27	4	4	4	5	4	4	4,17
28	4	4	4	4	4	4	4,00
29	5	5	5	5	5	5	5,00
30	5	4	5	5	4	4	4,50
31	4	4	4	4	4	5	4,17
32	4	4	4	5	4	4	4,17
33	5	5	4	5	5	5	4,83
34	5	5	5	5	5	5	5,00
35	5	5	5	5	5	5	5,00
36	5	5	5	4	5	4	4,67
37	4	4	4	4	4	4	4,00
38	4	4	4	4	4	4	4,00
39	4	4	4	4	4	4	4,00
40	4	4	4	4	4	4	4,00
41	4	5	4	4	4	4	4,17
42	4	4	4	4	5	4	4,17
43	4	4	4	4	4	5	4,17

44	4	4	4	4	4	4	4,00
45	4	4	4	4	4	4	4,00
46	4	4	4	4	4	5	4,17
47	4	4	5	5	5	5	4,67
48	5	5	5	4	4	4	4,50
49	5	4	4	4	5	4	4,33
50	5	4	4	4	4	5	4,33
51	4	4	4	4	4	4	4,00
52	4	4	4	4	4	5	4,17
53	4	4	5	5	4	4	4,33
54	4	4	4	4	4	5	4,17
55	4	4	5	4	4	5	4,33
56	4	4	4	3	3	4	3,67
57	5	5	4	4	4	4	4,33
58	4	3	4	4	3	3	3,50
59	4	4	4	5	5	4	4,33
60	4	4	4	5	4	4	4,17
61	4	4	4	4	4	3	3,83
62	4	4	4	4	4	3	3,83
63	4	4	4	4	4	4	4,00
64	4	4	4	4	4	3	3,83
65	4	4	4	5	5	4	4,33
66	4	4	4	5	4	4	4,17
67	4	4	4	5	5	5	4,50
68	4	4	4	4	4	4	4,00
69	4	4	4	4	5	4	4,17
70	5	5	5	5	5	5	5,00
71	4	4	4	4	3	3	3,67
72	4	4	4	4	3	4	3,83
73	4	4	4	4	4	3	3,83
74	4	4	4	4	5	4	4,17
75	4	4	4	4	4	4	4,00
76	4	4	4	5	4	4	4,17
77	4	4	4	4	5	4	4,17
78	4	5	4	4	4	4	4,17
79	4	4	4	4	4	4	4,00
80	4	4	4	4	5	5	4,33
81	5	4	4	4	4	4	4,17
82	4	4	4	4	4	4	4,00

83	4	4	4	4	5	5	4,33
84	4	4	5	4	4	5	4,33
85	4	4	4	4	4	4	4,00
86	4	4	4	4	5	5	4,33
87	4	4	4	4	3	4	3,83
88	4	4	4	4	4	3	3,83
89	4	4	4	4	4	4	4,00
90	5	5	4	4	4	4	4,33
91	4	4	4	4	4	4	4,00
92	4	4	4	4	4	3	3,83
93	4	4	4	4	4	5	4,17
94	4	4	4	4	4	4	4,00
95	4	5	5	4	4	4	4,33
96	4	4	4	4	4	4	4,00
97	4	4	4	4	3	4	3,83
98	5	4	4	4	4	5	4,33
99	4	4	4	3	3	4	3,67
100	4	4	4	4	4	4	4,00
101	4	4	5	4	4	4	4,17
102	4	4	4	4	4	4	4,00
103	4	5	5	4	4	4	4,33
104	4	4	4	4	4	4	4,00
105	4	4	4	4	4	4	4,00
106	4	5	5	4	4	4	4,33

Jawaban Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Nomor	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4,20
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
8	5	4	4	5	3	4	4	4	4	5	4,20
9	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4,40
10	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4,50
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
12	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4,30

13	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4,30
14	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4,00
15	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4,40
16	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4,70
17	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4,20
18	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3,80
19	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3,80
20	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3,80
21	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4,80
22	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3,80
23	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4,30
24	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4,30
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
26	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4,30
27	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4,10
28	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4,80
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
31	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4,50
32	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4,60
33	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4,90
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
35	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4,70
36	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4,40
37	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4,30
38	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4,20
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
41	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4,20
42	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4,80
43	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4,20
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
46	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4,20
47	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4,20
48	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4,30
49	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4,60
50	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4,60
51	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4,20

52	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4,20
53	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4,40
54	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4,20
55	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4,50
56	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4,70
57	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4,40
58	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3,70
59	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4,20
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
61	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4,10
62	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3,80
63	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3,70
64	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3,70
65	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,90
66	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4,10
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
68	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4,30
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
70	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4,50
71	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4,30
72	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3,80
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
74	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4,50
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
76	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3,70
77	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4,20
78	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4,20
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
80	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4,30
81	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4,10
82	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4,10
83	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4,20
84	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4,20
85	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4,20
86	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3,80
87	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4,20
88	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3,90
89	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,20
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00

91	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4,10
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4,10
93	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,20
94	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3,80
95	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4,00
96	4	4	4	4	3	5	4	4	3	4	3,90
97	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4,10
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
100	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4,30
101	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4,20
102	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3,80
103	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4,10
104	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4,20
105	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4,20
106	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,90

Jawaban Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Nomor	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Rata-rata
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
3	3	3	4	4	4	4	4	4	3,75
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
5	4	5	4	4	4	5	4	4	4,25
6	5	5	5	4	4	5	5	5	4,75
7	5	5	5	3	4	4	4	4	4,25
8	4	4	4	3	3	3	3	3	3,38
9	4	4	4	3	3	3	3	4	3,50
10	4	4	5	3	3	3	3	3	3,50
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
12	5	5	5	4	4	4	4	4	4,38
13	4	4	5	4	4	4	4	4	4,13
14	4	4	4	4	3	3	3	3	3,50
15	4	4	4	3	3	3	3	3	3,38
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
17	4	4	4	3	3	3	3	3	3,38
18	4	4	4	4	4	4	4	3	3,88
19	4	4	4	3	3	3	4	4	3,63
20	4	4	4	4	4	3	3	4	3,75

21	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
22	4	4	4	5	5	3	4	4	4,13
23	4	5	5	4	4	4	4	4	4,25
24	4	5	5	4	4	4	4	4	4,25
25	4	4	4	4	4	4	4	3	3,88
26	4	4	4	4	4	4	4	5	4,13
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
28	4	5	5	4	4	4	4	4	4,25
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
30	5	5	5	5	4	5	5	5	4,88
31	4	4	4	4	5	4	4	4	4,13
32	4	4	4	3	3	3	4	4	3,63
33	5	5	5	5	5	5	5	4	4,88
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
35	5	5	5	5	5	4	4	5	4,75
36	4	4	4	4	4	5	5	5	4,38
37	4	4	4	5	5	5	5	5	4,63
38	4	4	4	4	4	4	3	3	3,75
39	4	4	4	3	3	3	4	4	3,63
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
41	4	4	4	4	5	5	4	4	4,25
42	4	4	4	3	3	3	4	4	3,63
43	4	4	5	4	4	4	4	4	4,13
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
46	4	4	4	4	3	4	4	4	3,88
47	4	4	4	4	5	4	4	4	4,13
48	4	4	5	4	4	4	5	4	4,25
49	5	4	4	5	5	5	4	5	4,63
50	5	4	5	5	5	4	4	5	4,63
51	4	4	4	4	5	4	4	4	4,13
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
53	4	5	5	4	4	4	4	3	4,13
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
55	4	4	5	4	4	4	4	4	4,13
56	4	4	4	5	5	5	5	4	4,50
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
58	4	3	3	3	3	3	3	3	3,13
59	4	4	4	3	3	3	3	3	3,38

60	4	4	4	4	4	4	5	4	4,13
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
64	4	4	4	4	3	3	4	4	3,75
65	4	4	5	5	5	4	4	4	4,38
66	4	4	4	4	5	4	4	4	4,13
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
68	4	4	5	5	4	4	4	4	4,25
69	4	4	4	3	3	3	3	3	3,38
70	5	4	4	4	4	4	5	5	4,38
71	5	4	4	4	4	4	4	5	4,25
72	4	4	4	5	5	4	4	4	4,25
73	5	4	4	4	4	4	5	5	4,38
74	4	5	4	4	4	4	4	4	4,13
75	4	4	4	4	4	5	4	4	4,13
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
78	5	4	4	4	4	4	4	4	4,13
79	4	4	4	3	3	3	4	4	3,63
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
81	5	4	4	4	4	4	4	4	4,13
82	5	4	4	3	3	3	4	4	3,75
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
84	4	5	5	4	4	4	4	4	4,25
85	5	5	5	5	4	4	4	4	4,50
86	4	4	4	4	4	4	4	5	4,13
87	5	5	4	4	4	4	4	5	4,38
88	4	4	4	5	4	4	5	5	4,38
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
90	4	4	5	5	4	4	4	4	4,25
91	4	4	4	4	3	3	3	3	3,50
92	4	4	5	5	4	4	4	4	4,25
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
94	4	5	5	4	4	4	4	4	4,25
95	5	5	4	4	4	4	4	4	4,25
96	5	5	5	4	4	4	4	4	4,38
97	4	4	4	4	4	4	4	5	4,13
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00

99	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
100	5	5	4	4	4	4	4	4	4,25
101	4	4	4	4	3	3	3	4	3,63
102	5	5	4	4	4	4	4	4	4,25
103	4	4	4	4	4	4	5	5	4,25
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
105	5	5	4	4	4	4	4	4	4,25
106	5	5	5	4	4	4	4	4	4,38

Jawaban Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Nomor	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total
1	4	4	4	5	5	4	4	4,29
2	5	4	4	5	5	5	4	4,57
3	5	5	4	5	5	4	4	4,57
4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
5	5	5	5	4	4	4	4	4,43
6	5	5	5	5	5	5	5	5,00
7	5	5	5	5	5	4	4	4,71
8	4	4	4	4	4	4	4	4,00
9	5	5	5	5	5	5	4	4,86
10	5	5	5	5	4	4	4	4,57
11	5	5	5	5	5	5	5	5,00
12	4	4	4	4	4	4	4	4,00
13	4	4	4	4	5	4	4	4,14
14	4	4	4	4	4	3	3	3,71
15	4	4	4	4	4	4	4	4,00
16	5	5	5	5	5	5	4	4,86
17	5	4	4	4	4	4	4	4,14
18	4	4	4	4	4	3	4	3,86
19	4	4	4	4	4	3	4	3,86
20	5	4	5	4	4	3	3	4,00
21	4	4	4	4	4	4	4	4,00
22	5	5	5	5	5	4	4	4,71
23	4	4	4	5	5	4	4	4,29
24	4	4	4	5	5	4	4	4,29
25	4	5	5	5	5	3	3	4,29
26	4	4	4	5	5	4	4	4,29
27	5	5	5	5	5	4	4	4,71
28	5	5	5	5	5	5	4	4,86

29	4	5	5	5	5	4	4	4,57
30	5	5	5	5	5	5	4	4,86
31	4	4	4	5	5	5	5	4,57
32	4	4	4	4	4	4	4	4,00
33	4	5	5	5	5	5	5	4,86
34	5	5	5	5	5	5	5	5,00
35	4	4	4	4	5	3	3	3,86
36	4	4	4	4	4	4	4	4,00
37	4	5	4	5	5	5	4	4,57
38	4	4	4	4	4	4	4	4,00
39	4	4	4	5	4	3	4	4,00
40	4	4	4	4	4	4	4	4,00
41	5	5	5	5	5	5	4	4,86
42	4	4	4	5	4	4	4	4,14
43	4	5	5	5	5	5	4	4,71
44	4	5	5	4	3	4	5	4,29
45	4	4	4	4	4	4	4	4,00
46	4	4	4	5	5	4	4	4,29
47	4	4	4	4	5	5	5	4,43
48	4	4	4	5	5	5	4	4,43
49	5	5	5	5	5	4	4	4,71
50	5	5	5	5	5	4	4	4,71
51	5	5	5	4	4	4	4	4,43
52	4	5	4	4	4	4	4	4,14
53	4	4	4	4	4	4	4	4,00
54	4	5	4	4	4	4	4	4,14
55	5	5	5	5	5	5	5	5,00
56	4	4	4	4	5	4	4	4,14
57	5	5	5	5	5	5	5	5,00
58	5	4	4	4	4	3	2	3,71
59	5	5	5	5	4	4	4	4,57
60	4	4	4	4	4	4	4	4,00
61	4	5	5	5	5	4	4	4,57
62	3	4	4	4	4	4	4	3,86
63	3	4	4	4	4	4	4	3,86
64	3	4	4	4	4	4	4	3,86
65	4	4	4	4	4	4	4	4,00
66	5	5	5	5	4	4	4	4,57
67	5	5	5	5	5	5	5	5,00

68	4	4	4	4	5	4	4	4,14
69	4	4	4	4	4	3	3	3,71
70	4	4	4	4	4	4	4	4,00
71	4	5	5	4	4	4	4	4,29
72	4	4	4	5	5	4	4	4,29
73	5	4	4	4	4	4	4	4,14
74	4	5	4	4	5	4	4	4,29
75	4	4	4	4	4	3	4	3,86
76	5	4	4	4	4	4	4	4,14
77	4	4	4	4	4	4	4	4,00
78	4	4	4	4	4	4	4	4,00
79	4	5	4	4	5	5	4	4,43
80	5	5	4	5	4	4	4	4,43
81	5	5	4	4	4	3	3	4,00
82	4	4	4	4	4	4	4	4,00
83	4	4	4	5	5	4	4	4,29
84	5	5	4	4	4	4	4	4,29
85	4	4	5	4	4	4	4	4,14
86	5	5	4	4	4	4	4	4,29
87	4	4	4	4	5	4	4	4,14
88	5	4	4	4	4	4	3	4,00
89	5	4	4	4	4	3	4	4,00
90	4	4	4	4	4	4	4	4,00
91	4	5	4	4	5	4	4	4,29
92	4	4	4	4	4	4	4	4,00
93	5	5	4	5	4	3	4	4,29
94	5	5	5	5	5	4	4	4,71
95	5	4	4	4	4	4	4	4,14
96	5	4	4	4	4	4	5	4,29
97	5	5	4	4	4	4	4	4,29
98	5	5	4	4	4	4	4	4,29
99	5	5	4	4	5	4	4	4,43
100	4	4	4	4	5	4	4	4,14
101	5	5	4	4	4	4	4	4,29
102	5	4	4	5	5	4	4	4,43
103	4	4	4	4	4	4	4	4,00
104	4	5	5	4	4	4	4	4,29
105	5	5	4	4	4	3	4	4,14
106	5	5	4	4	4	4	4	4,29

Lampiran 5: Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Correlations											
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Total
P1	Pearson Correlation	1	,264**	0,031	-	0,017	0,175	,194*	,365**	,227*	,415**
	Sig. (2-tailed)		0,006	0,754	0,767	0,865	0,073	0,046	0,000	0,019	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P2	Pearson Correlation	,264**	1	,617**	,421**	0,021	0,191	,338**	,333**	,299**	,645**
	Sig. (2-tailed)	0,006		0,000	0,000	0,831	0,050	0,000	0,000	0,002	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P3	Pearson Correlation	0,031	,617**	1	,476**	0,107	,225*	,316**	,372**	,277**	,626**
	Sig. (2-tailed)	0,754	0,000		0,000	0,275	0,020	0,001	0,000	0,004	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P4	Pearson Correlation	-	,421**	,476**	1	0,179	,284**	,576**	,291**	,290**	,645**
	Sig. (2-tailed)	0,029	0,000	0,000		0,067	0,003	0,000	0,002	0,003	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P5	Pearson Correlation	-	0,021	0,107	0,179	1	,409**	0,109	0,118	0,171	,436**
	Sig. (2-tailed)	0,017	0,831	0,275	0,067		0,000	0,265	0,228	0,080	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P6	Pearson Correlation	0,175	0,191	,225*	,284**	,409**	1	,334**	,229*	,243*	,620**
	Sig. (2-tailed)	0,073	0,050	0,020	0,003	0,000		0,000	0,018	0,012	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P7	Pearson Correlation	,194*	,338**	,316**	,576**	0,109	,334**	1	,384**	,417**	,676**
	Sig. (2-tailed)	0,046	0,000	0,001	0,000	0,265	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P8	Pearson Correlation	,365**	,333**	,372**	,291**	0,118	,229*	,384**	1	,419**	,639**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,002	0,228	0,018	0,000		0,000	0,000

	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P9	Pearson Correlation	,227*	,299**	,277**	,290**	0,171	,243*	,417**	,419**	1	,606**
	Sig. (2-tailed)	0,019	0,002	0,004	0,003	0,080	0,012	0,000	0,000		0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Total	Pearson Correlation	,415**	,645**	,626**	,645**	,436**	,620**	,676**	,639**	,606**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,755	9

Uji Validitas

Variabel Independen 1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

		Correlations						
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total
P1	Pearson Correlation	1	,365**	,229*	0,157	0,161	0,135	,499**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,018	0,108	0,099	0,167	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106
P2	Pearson Correlation	,365**	1	,592**	,340**	,382**	,312**	,715**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000	0,001	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106
P3	Pearson Correlation	,229*	,592**	1	,492**	,297**	,303**	,693**
	Sig. (2-tailed)	0,018	0,000		0,000	0,002	0,002	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106
P4	Pearson Correlation	0,157	,340**	,492**	1	,449**	,355**	,694**
	Sig. (2-tailed)							

	Sig. (2-tailed)	0,108	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106
P5	Pearson Correlation	0,161	,382**	,297**	,449**	1	,523**	,726**
	Sig. (2-tailed)	0,099	0,000	0,002	0,000		0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106
P6	Pearson Correlation	0,135	,312**	,303**	,355**	,523**	1	,687**
	Sig. (2-tailed)	0,167	0,001	0,002	0,000	0,000		0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106
Total	Pearson Correlation	,499**	,715**	,693**	,694**	,726**	,687**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	106	106	106	106	106	106	106

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Variabel Independen 1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,748	6

Uji Validitas

Variabel Independen 2: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Correlations												
		P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	Total
P01	Pearson Correlation	1	,656*	,424*	,697*	,539*	,424*	,512**	,372*	,484*	,566*	,771*
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,019	0,000	0,002	0,019	0,004	0,043	0,007	0,001	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P02	Pearson Correlation	,656*	1	,717*	,421*	,392*	,464**	,499**	0,296	,549*	,591*	,745*
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,020	0,032	0,010	0,005	0,112	0,002	0,001	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

P03	Pearson Correlation	,424*	,717*	1	,563*	,419*	,400*	,603**	0,351	,489*	,400*	,723*
	Sig. (2-tailed)	0,019	0,000		0,001	0,021	0,029	0,000	0,057	0,006	0,029	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P04	Pearson Correlation	,697*	,421*	,563*	1	,494*	0,246	,408*	0,216	0,193	,457*	,655*
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,020	0,001		0,006	0,190	0,025	0,252	0,308	0,011	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P05	Pearson Correlation	,539*	,392*	,419*	,494*	1	,534**	,626**	,468**	,507*	,419*	,741*
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,032	0,021	0,006		0,002	0,000	0,009	0,004	0,021	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P06	Pearson Correlation	,424*	,464*	,400*	0,246	,534*	1	,724**	,745**	,783*	,550*	,776*
	Sig. (2-tailed)	0,019	0,010	0,029	0,190	0,002		0,000	0,000	0,000	0,002	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P07	Pearson Correlation	,512*	,499*	,603*	,408*	,626*	,724**	1	,635**	,673*	,483*	,829*
	Sig. (2-tailed)	0,004	0,005	0,000	0,025	0,000	0,000		0,000	0,000	0,007	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P08	Pearson Correlation	,372*	0,296	0,351	0,216	,468*	,745**	,635**	1	,686*	0,351	,681*
	Sig. (2-tailed)	0,043	0,112	0,057	0,252	0,009	0,000	0,000		0,000	0,057	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P09	Pearson Correlation	,484*	,549*	,489*	0,193	,507*	,783**	,673**	,686**	1	,636*	,788*
	Sig. (2-tailed)	0,007	0,002	0,006	0,308	0,004	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	,566*	,591*	,400*	,457*	,419*	,550**	,483**	0,351	,636*	1	,723*
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,001	0,029	0,011	0,021	0,002	0,007	0,057	0,000		0,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	,771*	,745*	,723*	,655*	,741*	,776**	,829**	,681**	,788*	,723*	1

Sig. (2-tailed)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Variabel Independen 2: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,850	10

Uji Validitas

Variabel Independen 3: Kompetensi Sumber Daya Manusia

		Correlations								
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
P1	Pearson Correlation	1	,626**	,367**	,277**	,268**	,322**	,348**	,444**	,608**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,004	0,005	0,001	0,000	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P2	Pearson Correlation	,626**	1	,621**	,269**	,259**	,381**	,299**	,251**	,613**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,005	0,007	0,000	0,002	0,009	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P3	Pearson Correlation	,367**	,621**	1	,406**	,296**	,319**	,296**	,208*	,588**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,002	0,001	0,002	0,033	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P4	Pearson Correlation	,277**	,269**	,406**	1	,764**	,658**	,541**	,507**	,788**
	Sig. (2-tailed)	0,004	0,005	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P5	Pearson Correlation	,268**	,259**	,296**	,764**	1	,734**	,551**	,493**	,784**
	Sig. (2-tailed)	0,005	0,007	0,002	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106

P6	Pearson Correlation	,322**	,381**	,319**	,658**	,734**	1	,709**	,556**	,831**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P7	Pearson Correlation	,348**	,299**	,296**	,541**	,551**	,709**	1	,712**	,786**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106
P8	Pearson Correlation	,444**	,251**	,208*	,507**	,493**	,556**	,712**	1	,736**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,009	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Total	Pearson Correlation	,608**	,613**	,588**	,788**	,784**	,831**	,786**	,736**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	106	106	106	106	106	106	106	106	106

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Variabel Independen 3: Kompetensi Sumber Daya Manusia

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,868	8

Uji Validitas

Variabel Independen 4: Pemanfaatan Teknologi Informasi

		Correlations							
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total
P1	Pearson Correlation	1	,522**	,390**	,296**	0,107	0,125	0,046	,545**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,002	0,274	0,200	0,640	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106

P2	Pearson Correlation	,522**	1	,640**	,387**	,245*	,298**	,212*	,708**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,011	0,002	0,029	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106
P3	Pearson Correlation	,390**	,640**	1	,518**	,297**	,351**	,244*	,729**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,002	0,000	0,012	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106
P4	Pearson Correlation	,296**	,387**	,518**	1	,646**	,417**	,263**	,755**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,006	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106
P5	Pearson Correlation	0,107	,245*	,297**	,646**	1	,492**	,208*	,648**
	Sig. (2-tailed)	0,274	0,011	0,002	0,000		0,000	0,032	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106
P6	Pearson Correlation	0,125	,298**	,351**	,417**	,492**	1	,630**	,718**
	Sig. (2-tailed)	0,200	0,002	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106
P7	Pearson Correlation	0,046	,212*	,244*	,263**	,208*	,630**	1	,550**
	Sig. (2-tailed)	0,640	0,029	0,012	0,006	0,032	0,000		0,000
	N	106	106	106	106	106	106	106	106
Total	Pearson Correlation	,545**	,708**	,729**	,755**	,648**	,718**	,550**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	106	106	106	106	106	106	106	106

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Variabel Independen 4: Pemanfaatan Teknologi Informasi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,861	7

Lampiran 6: Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,88248088
Most Extreme Differences	Absolute	0,066
	Positive	0,066
	Negative	-0,062
Test Statistic		0,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9,814	3,065		3,202	0,002		
	Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	0,480	0,112	0,381	4,290	0,000	0,660	1,515
	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0,165	0,072	0,211	2,294	0,024	0,614	1,627
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,196	0,070	0,230	2,801	0,006	0,772	1,295
	Teknologi Informasi	0,079	0,093	0,071	0,846	0,400	0,730	1,369

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4,763	1,899		-2,508	0,014
	Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	0,116	0,069	0,194	1,677	0,097

	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0,041	0,045	0,111	0,921	0,359
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,004	0,043	0,011	0,098	0,922
	Teknologi Informasi	0,046	0,058	0,087	0,793	0,430

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 7: Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,688 ^a	0,474	0,453	1,919

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,091	0,340		3,204	0,002
	Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	0,319	0,075	0,381	4,280	0,000
	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0,183	0,080	0,212	2,297	0,024
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,173	0,062	0,229	2,787	0,006
	Teknologi Informasi	0,063	0,073	0,073	0,863	0,390